



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGANGGURAN DI  
SUMATERA BARAT PASCA KRISIS EKONOMI PADA TAHUN  
2000-2010**

**SKRIPSI**



**RISWANDI  
06 151 151**

**JURUSAN ILMU EKONOMI**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2011**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

Menghemat Belanja Merupakan Separuh Pendapatan

Mencintai Orang Lain Adalah Separuh Akal, dan

Bertanya Dengan Baik Adalah Separuh Ilmu



*Kupersembahkan karya kecilku ini  
untuk keluarga dan orang-orang terdekatku  
yang selalu memberikan harapan, semangat  
dan cinta dengan sepenuh hati*

**JURUSAN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ANDALAS**


**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Dengan ini Dekan Fakultas Ekonomi, Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi, dan Pembimbing Skripsi menyatakan bahwa :

Nama : RISWANDI  
No.BP : 06 151 151  
Program Studi : S - 1  
Jurusan : Ilmu Ekonomi  
Judul Skripsi : Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran di Sumatera Barat Pasca Krisis Ekonomi Pada Tahun 2000-2010

Telah diseminarkan pada tanggal 4 November 2011 dan telah disetujui dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Disetujui oleh :  
Pembimbing Skripsi

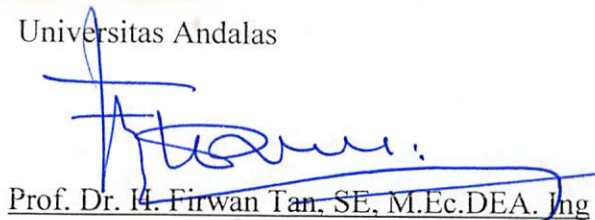


Edi Ariyanto, SE, Msi

NIP. 1958021111987021003


Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi  
Universitas Andalas

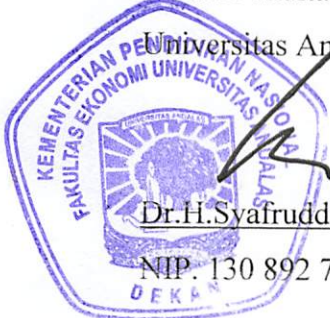


Prof. Dr. H. Firwan Tan, SE, M.Ec.DEA, Jng  
NIP. 130 812 952


Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Andalas



Dr. H. Syafruddin Karimi, SE, MA  
NIP. 130 892 743





	No. Alumni Universitas	<b>RISWANDI</b>	No. Alumni Fakultas
	<b>BIODATA</b>		
<p>a) Tempat/Tanggal Lahir : Palembang / 18 Juni 1988 b) Nama Orang Tua : Yanuardi &amp; Zulhelni c) Fakultas : Ekonomi d) Jurusan : Ilmu Ekonomi e) No. BP : 06151151 f) Tanggal Lulus : 04 November 2011 g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h) IPK : i) Lama Studi : 5 Tahun h) Alamat Orang Tua : Jln. Palembang-Jambi km.111, no.25, Kecamatan Sungai Lilin, Kab. Musi Banyuasin, SUMSEL.</p>			

**Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran di Sumatera Barat Pasca Krisis Ekonomi Pada Tahun 2000-2010**

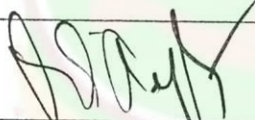
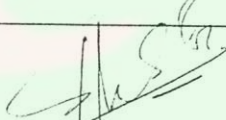
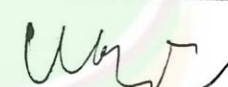
Skripsi S1 oleh: Riswandi Pembimbing Skripsi: Edi Ariyanto, SE, M.Si

**Abstrak**

Skripsi ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran pasca krisis ekonomi di Sumatera Barat periode 2000 hingga 2010. Adapun variabel-variabel yang dianalisis adalah Pertumbuhan Ekonomi ( $Y_d$ ), Pertumbuhan Penduduk ( $J_p$ ), Investasi Swasta ( $I_s$ ), dan Upah Minimum Regional ( $w$ ). Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis bagaimana hubungan variabel  $Y_d$ ,  $J_p$ ,  $I_s$ , dan  $w$  serta untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan apa saja yang sudah dilakukan Pemerintah dan memberikan langkah kebijakan untuk mengatasi masalah pengangguran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable pertumbuhan ekonomi dan upah minimum regional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengangguran, sedangkan variable lainnya yaitu pertumbuhan penduduk dan investasi swasta memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap pengangguran di Sumatera Barat. Oleh sebab itu, pemerintah daerah Sumbar perlu meningkatkan Kesempatan kerja melalui upaya peningkatan lapangan usaha dan keterampilan pekerja, penanaman modal disektor industri hendaknya bersifat padat karya. Dengan pengoptimalan sumber-sumber daya manusia yang tersedia dengan tingkat pendidikan yang bervariasi dan dapat dilatih sesuai dengan keinginan pasar kerja, maka selain akan meningkatkan pendapatan daerah juga akan berdampak pada pengurangan jumlah pengangguran. Selain itu, keamanan berinvestasi baik ditinjau dari pihak masyarakat maupun pemerintah di daerah juga menjadi penentu mau atau tidaknya investor melakukan investasi dengan menjaga isu-isu tentang daerah baik isu social, ekonomi maupun politik yang akan mempengaruhi perkembangan investasi di daerah tersebut.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal : 04 November 2011

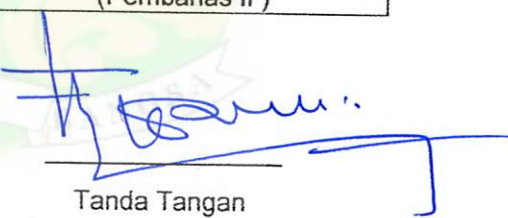
Abstrak telah disetujui oleh :

Tanda Tangan	1. 	2. 	3. 
Nama Terang	Edi Ariyanto, SE, M.Si (Pembimbing)	Dra. Syukriati Sy.M.Si (Pembahas I)	Dra. Wahyuni E. Marinda, M.Si (Pembahas II)

Mengetahui,  
Ketua Jurusan

**Prof. Dr. H. Firwan Tan, SE, M.Ec. DEA. Ing**

NIP. 130 812 952

  
Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke fakultas/universitas dan mendapat nomor alumnus :

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama	Tanda Tangan
No. Alumni Universitas	Nama	Tanda Tangan

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai prasyarat untuk menyelesaikan Studi Strata atau S1 pada Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Dalam penyusunan skripsi yang berjudul **“Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran di Sumatera Barat Pasca Krisis Ekonomi pada Tahun 2000-2010”**, tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang memungkinkan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu rasa terima kasih sedalam-dalamnya penulis haturkan kepada:

1. Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya, yang telah memberikan mukjizat serta kekuatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Edi Ariyanto, SE, M.Si selaku pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing penulis melalui diskusi, masukan dan arahan serta kebaikan-kebaikan Bapak selama proses penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Syafruddin Karimi, SE, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
4. Bapak Prof. Dr. H. Firwan Tan, SE, M.Ec, DEA.Ing, selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

5. Bapak Febriandi Prima Putra, SE, M.Si, selaku Ketua Program Studi Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
6. Ibu Dra. Syukriati Syukur, M.Si dan ibu Dra. Wahyuni E. Marinda, M.Si selaku tim pembahas yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.
7. Seluruh dosen yang mengabdikan pada Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
8. Bapak dan Ibu karyawan biro Jurusan Ilmu Ekonomi dan pegawai Dekanat Fakultas Ekonomi yang telah membantu proses kelancaran administrasi selama penulis kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

Dengan segala ketulusan hati dan rasa cinta, serta terimakasih yang sangat istimewa dari penulis kepada kedua orang tua, Bapak (Yanuardi) dan Ibu (Zulhelni), serta kakakku dan adikku, Alex Saputra dan Febriandi, thanks buat dukungan dan semua doa yang diberikan kepada penulis selama ini, motivasi dan pengorbanannya serta kasih sayang yang menyertai langkah penulis, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amiin.

Terimakasih kepada keluarga penulis Pak Angah, Mak Angah, Mak uwo (pokoknya semua keluarga besar di Riau) dan Upiak Banun yang memberikan dukungan dan semangat kepada penulis untuk bisa terus maju.

Secara spesial penulis sampaikan terimakasih teruntuk Rizky Gusniyanti, SE, seseorang yang spesial dalam memberikan andil yang juga spesial untuk



selesainya penulisan dan penjiilidan skripsi ini (ingat master plan jangka panjang kita ya.....).

Kemudian terimakasih buat teman-teman penulis Eet, Afdal, Alberto, Ramadefi, Robby, Anggi, Adek, Wiwit, Febi, Jiji, Randi, Rendi, Priska, thanks buat dukungannya selama ini ya pRen...

Terimakasih buat teman-teman JIE 06, senior dan junior JIE. Penulis mohon maaf karena namanya tidak bisa disebutkan di sini satu persatu, tetapi yakinlah bahwa penulis tetap memiliki niat baik untuk terus bersilaturahmi dengan teman-teman semua.

Teman-teman KKN 2010 Nagari Panampuang khususnya jorong Kubu dan Sungai Beringin: Aldo, dr. Nanda, Ina, Kusnady, dr. Nana, Intan, Jiji, Ani Keket, Rini, (thanks telah menjadi koki pribadi kami, hee...)

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kelemahan, sehingga penulis tak lupa mengharapkan saran dan kritik atas skripsi ini.

Padang, November 2011

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat.....	9
1.5. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
1.6. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI DAN STUDI LITERATUR</b>	
2.1. Landasan Teori.....	11
2.11. Konsep Tenaga Kerja dan Pengangguran.....	11
2.12. Konsep Pertumbuhan Ekonomi.....	18
2.13. Konsep Pertumbuhan Penduduk.....	21
2.14. Konsep Investasi.....	26
2.15. Teori Upah.....	31
2.16. Kerangka Pikir.....	34
2.2. Studi Literatur.....	36
2.3. Hipotesa.....	38



### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

3.1. Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data .....	39
3.2. Metode Analisa dan Pembentukan Model .....	39
3.2.1. Analisis Deskriptif dan Induktif .....	39
3.2.2. Analisis Regresi Berganda.....	40
3.3. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional .....	42
3.4. Uji Statististik.....	43

### **BAB IV TINJAUAN UMUM**

4.1. Keadaan Geografis .....	48
4.2. Perkembangan Perekonomian di Sumatera Barat .....	49
4.3. Ketenagakerjaan .....	52
4.4. Pertumbuhan Penduduk di Sumatera Barat.....	58
4.5. Investasi.....	61
4.6. Upah Minimum Regional.....	62

### **BAB V PENEMUAN EMPIRIS DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN**

5.1. Penemuan Empiris.....	66
5.2. Implikasi Kebijakan .....	70

### **BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**

6.1. Kesimpulan.....	74
6.2. Saran.....	75

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Jumlah dan Laju Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan 2000 Provinsi Sumatera Barat 2000-2010 .....	50
Tabel 4.2	Penduduk Usia Kerja (jiwa) Provinsi Sumatera Barat, 2000-2010 .....	53
Tabel 4.3	Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Kegiatan Utama Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2000-2010.....	54
Tabel 4.4	Perkembangan Angkatan Kerja, Kesempatan Kerja dan Pengangguran Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2000-2010 (Jiwa ) .....	56
Tabel 4.5	Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2000-2010.....	59
Tabel 4.6	Nilai Investasi Pemerintah Atas Dasar Harga Konstan 2000 dan Realisasi PMDN / PMA Provinsi Sumatera Barat. Tahun 2000-2010.....	61
Tabel 4.7	Perkembangan Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2000-2010.....	63

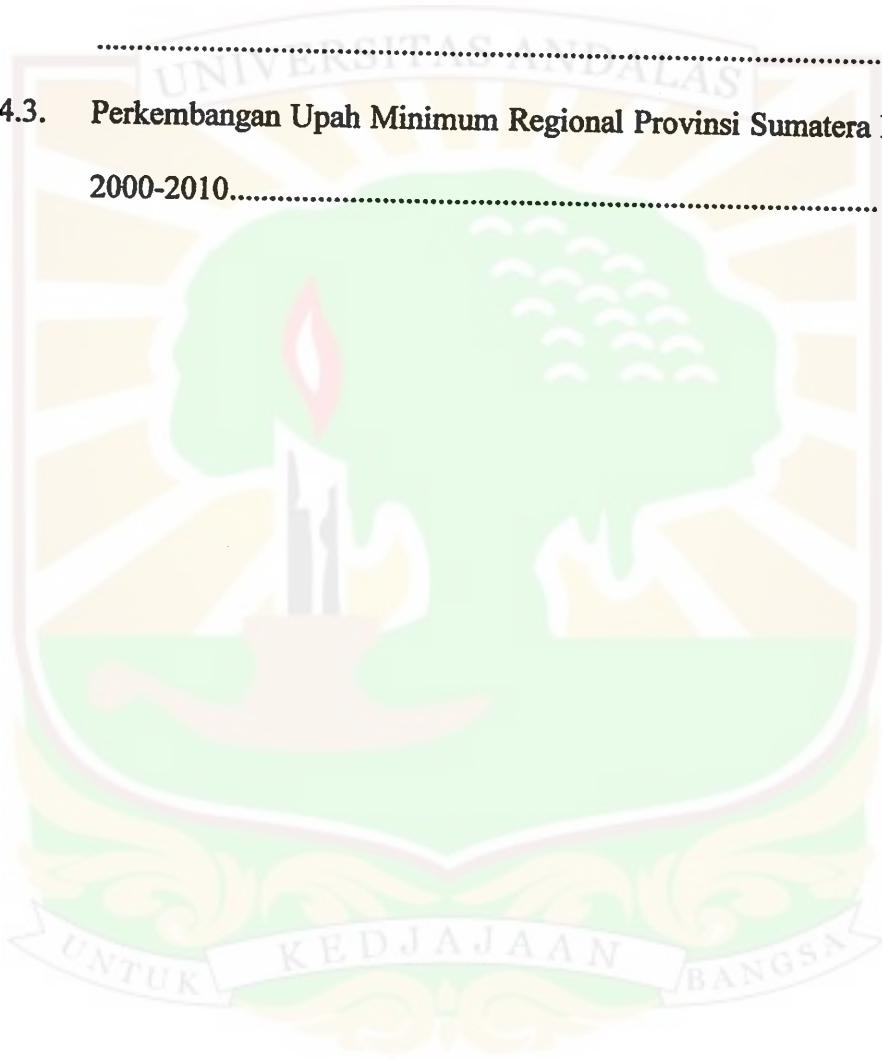
## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Pasar Tenaga Kerja Mengikuti Pasar .....	12
Gambar 1.2. Pengangguran Akibat Peraturan Upah Minimum .....	34



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat, 2000-2010	51
Grafik 4.2.	Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sumatera Barat, 2000-2010	60
Grafik 4.3.	Perkembangan Upah Minimum Regional Provinsi Sumatera Barat, 2000-2010.....	64





# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk terbesar keempat didunia memiliki potensi pasar yang cukup besar dilihat dari sisi input tenaga kerja. Jumlah penduduk yang besar dapat menggerakkan pasar dari sudut permintaan melalui *multiplier effect* karena adanya *aggregat demand* yang tinggi. Sebagai sumber tenaga kerja, jumlah penduduk yang besar dapat menjadi penggerak perekonomian dari sisi penawaran. Namun kenyataannya yang dihadapi hingga saat ini, jumlah penduduk dan tenaga kerja yang besar tidak menjadi aset potensial yang dapat dikembangkan untuk mendorong kegiatan ekonomi melainkan secara tidak langsung menjadi beban negara dalam pembangunan. Ada dua pandangan mengenai pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap pembangunan ekonomi. Pandangan pertama mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang cepat dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Pandangan kedua mengatakan bahwa penduduk yang besar merupakan pemicu pertumbuhan ekonomi. Namun pada akhirnya persoalan penduduk merupakan beban atau modal pembangunan ekonomi, persoalannya bukan semata-mata terletak pada besar kecil jumlahnya. Akan tetapi, juga tergantung pada kualitas dan kapasitas penduduk itu sendiri (Sofyardi, 1999).

Perencanaan merupakan sebuah upaya untuk mengantisipasi ketidakseimbangan yang terjadi yang bersifat akumulatif. Artinya, perubahan yang terjadi pada sebuah keseimbangan awal dapat menyebabkan perubahan pada

sistem sosial yang kemudian akan membawa sistem yang ada menjauhi keseimbangan semula. Perencanaan memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembangunan. Salah satu peran perencanaan adalah sebagai arahan bagi proses pembangunan untuk berjalan menuju tujuan yang ingin dicapai disamping sebagai tolok ukur keberhasilan proses pembangunan yang dilakukan. Sedangkan pembangunan sendiri dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) di tingkat nasional atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di tingkat daerah.

Salah satu masalah yang cukup serius dihadapi Indonesia dewasa ini adalah masalah pengangguran. Pengangguran merupakan masalah ketenagakerjaan yang saat ini sudah mencapai kondisi yang cukup memprihatinkan. Jumlah penganggur dan setengah penganggur mengalami peningkatan. Sebaliknya pengangguran dan setengah pengangguran yang tinggi merupakan pemborosan-pemborosan sumber daya dan potensi yang ada, menjadi beban keluarga dan masyarakat, sumber utama kemiskinan, dapat mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminal, dan dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang (Depnakertrans, 2004).

Perkembangan ekonomi akan diikuti oleh perubahan output dan masalah ketenagakerjaan, dimana pada kondisi ini sektor primer akan semakin berkurang peranannya, sejalan dengan perkembangan yang pesat dari sektor-sektor lainnya seperti sektor industri dan jasa. Hal ini akan membawa kecenderungan bahwa tenaga kerja yang terdapat pada sektor primer akan berpindah ke sektor lain yaitu industri dan jasa (Ritonga, 2003).

Indonesia merupakan negara berkembang yang berpendapatan masih rendah. Prioritas pembangunan di Indonesia haruslah pada program peningkatan sumber daya manusia yaitu melalui pendidikan dan kesehatan. Elfindri (2001) menyatakan bahwa agar dampak dari globalisasi tidak dirasakan negatif oleh yang tidak berpendidikan, strategi pembangunan dan pembinaan perlu disesuaikan secara cepat. Strategi tersebut bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, namun pihak rumah tangga, sebagai pengambil keputusan untuk mempersiapkan generasi masa mendatang, perlu melakukan penyesuaian orientasi investasi.

Jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat. Data survey penduduk antar sensus (SUPAS) tahun 2005 memperlihatkan bahwa penduduk Indonesia berjumlah 219,85 juta jiwa. Otomatis jumlah angkatan kerja di Indonesia juga akan meningkat karena jumlah angkatan kerja ini berhubungan positif dengan banyaknya jumlah tenaga kerja. Jumlah angkatan kerja di Indonesia pada tahun yang sama yaitu berjumlah 105,80 juta jiwa. Di Provinsi Sumatera Barat jumlah penduduk pada tahun 2010 sudah mencapai 4.845.998 jiwa dan jumlah angkatan kerja sebanyak 2.194.040 jiwa (BPS, 2010).

Jumlah penduduk yang besar merupakan keunggulan bagi Indonesia dalam hal penyediaan tenaga kerja. Namun hal ini juga memberikan dampak berupa tersedianya angkatan kerja yang besar. Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat menyebabkan masalah pengangguran yang ada di suatu daerah menjadi semakin serius. Besarnya tingkat pengangguran merupakan cerminan kurang berhasilnya pembangunan di suatu negara. Pengangguran dapat mempengaruhi kemiskinan dengan berbagai cara

(Tambunan, 2001).

Ketika krisis mulai terjadi pada akhir tahun 1997 yang ditandai dengan meningkatnya nilai mata uang dolar, hal ini sangat berpengaruh terhadap harga barang di pasar domestik terutama barang impor kebutuhan pokok. Akibat dari terdepresiasi nilai rupiah tersebut, harga barang terus meningkat. Gejala lain yang terjadi di bidang ekonomi, di antaranya melemahnya kegiatan dunia usaha, menurunnya upah riil, menurunnya pendapatan perkapita, menurunnya daya beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi negatif serta tingginya angka inflasi terutama pekerja di sektor formal, yang berdampak meningkatnya pengangguran akibat semakin minimnya lapangan pekerjaan dan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) massal beberapa perusahaan dan industri yang berhenti beroperasi karena tingginya biaya produksi akibat depresiasi rupiah.

Gejala tersebut yang membuat perekonomian Indonesia yang ditinjau secara makro dan mikro tidak menguntungkan dan sangat berpengaruh terhadap tingkat produktifitas, sehingga menghantarkan Indonesia masuk kedalam kelompok negara-negara berkembang, seperti pernyataan yang dikemukakan oleh Todaro (2000) bahwa: "*Ciri-ciri dari negara berkembang adalah standar hidup yang rendah, dengan produktivitas yang rendah (low level of productivity).*"

Krisis ekonomi pada 1997 juga berdampak pada perekonomian di Sumatera Barat. Setelah mengalami keterpurukan yang cukup parah pasca tahun 1998, mulai tahun 1999 perekonomian Sumatera Barat mulai memperlihatkan kebangkitan kembali. Namun secara umum, tren pertumbuhan ekonomi tersebut



belum kembali seperti sebelum masa krisis. Pertumbuhan ekonomi yang lambat pulih tersebut diiringi dengan tingkat penyerapan tenaga kerja yang masih rendah.

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang kaya akan sumber daya alam seperti pertanian, perkebunan dan hasil hutan. Di Sumatera Barat laju pertumbuhan ekonomi juga meningkat, yaitu sebesar 5,93% pada tahun 2010 dibanding dengan tahun 2009. Jumlah penduduk sebesar 4,85 juta jiwa dengan jumlah penduduk usia kerja sebesar 3,31 juta jiwa (2010). Jumlah angkatan kerja sebesar 66,36% dari penduduk usia produktif (2,19 juta jiwa). Sementara penduduk bukan angkatan kerja sebanyak 33,064% dari penduduk usia produktif (1,11 juta jiwa) dan Jumlah pengangguran (2010) sebanyak 152,59 ribu jiwa ([www.sumbarprov.go.id](http://www.sumbarprov.go.id)).

Laju pertumbuhan penduduk di Sumatera Barat sendiri dalam periode 2000-2010 telah meningkat sebesar 14,82% (625,67 ribu jiwa). Namun di pasar kerja pengangguran dari segi penawaran cenderung meningkat yang menunjukkan terdapatnya kelebihan tenaga kerja.

Pertumbuhan penduduk yang pesat di Sumatera Barat yang apabila tidak diiringi dengan penciptaan kesempatan kerja akan menimbulkan pengangguran. Hal ini membawa berbagai tantangan bagi pemerintah daerah dalam mengatasi pengangguran untuk memenuhi permintaan hidup masyarakat seperti sandang, pangan, prasarana kesehatan, pendidikan dan juga dalam hal penyediaan lapangan kerja, sehingga dituntut peranan pemerintah daerah dan masyarakat yang lebih besar.

Agar kesempatan kerja meningkat, maka pengeluaran pemerintah harus diarahkan kepada penyediaan *social over head* dan pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Pengeluaran seperti itu akan menciptakan lapangan kerja dan efisiensi produktifitas ekonomi. Investasi dari pihak swasta juga menentukan kegiatan produksi atau ekonomi yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain ditentukan oleh besarnya investasi, kesempatan kerja juga ditentukan oleh tingkat upah. Tingkat upah yang rendah akan mendorong perluasan kesempatan kerja.

Kesempatan kerja ini juga akan dipengaruhi oleh jumlah penduduk, angkatan kerja dan kebijaksanaan kesempatan kerja itu sendiri. Keseluruhan faktor-faktor ini, secara langsung atau tidak langsung, akan dipengaruhi pula oleh berbagai faktor-faktor internasional, baik ekonomi maupun politik (Tjiptoherijanto, 1996).

Dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya manusia harus bekerja atau melakukan aktivitas ekonomi. Tetapi berdasarkan kenyataan yang ada jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia lebih sedikit dari jumlah angkatan tenaga kerja yang ada. Akibat dari banyaknya penawaran tenaga kerja, akan banyak terjadi pengangguran karena jumlah tenaga kerja yang tersedia tidak termanfaatkan. Sektor industri yang diharapkan dapat menyerap atau dapat menyediakan lapangan kerja ternyata tidak begitu berhasil baik. Sempitnya lapangan kerja ini disebabkan sektor industri tidak dapat menyerap tenaga kerja yang ada di daerah perkotaan. Banyak perusahaan pada saat krisis menutup usahanya karena tingginya biaya produksi, atau pilihan yang diambil oleh banyak perusahaan dengan jalan

mengurangi jumlah tenaga kerja dan bisa juga dengan mengubah penggunaan modal dari yang padat karya menjadi padat modal (efisiensi biaya produksi). Fenomena diatas disebabkan oleh krisis ekonomi yang melanda Indonesia dari sejak pertengahan tahun 1998. Dampak krisis ini berdampak langsung pada tingkat pengangguran yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat.

Meskipun pengangguran telah mengganggu kapitalisme sejak Revolusi Industri, akan tetapi setiap usaha untuk memahami penyebab serta biaya yang ditimbulkannya, sejauh ini hanya dimungkinkan dengan semakin berkembangnya teori makroekonomi. Sekarang mulai terlihat bahwa resesi dan pengangguran yang tinggi menimbulkan baban yang amat besar terhadap perekonomian (Samuelson, 1992).

Faktor tingkat upah masuk ke dalam penelitian ini karena secara teoritis permintaan tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh tingkat upah. Ditinjau dari faktor upah, selama ini masalah yang sering timbul dalam hal pengupahan adalah adanya perbedaan pengertian dan kepentingan mengenai upah antara pengusaha dan pekerja. Sehingga dalam hal ini diperlukan kebijakan pemerintah untuk mengatasi perbedaan kepentingan tersebut. Perbaikan upah berarti peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat. Peningkatan pendapatan masyarakat akan meningkatkan permintaan akan barang dan jasa yang kemudian pada gilirannya secara makro mendorong perusahaan untuk berkembang.

Berdasarkan kenyataan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian tentang **“Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran di Sumatera Barat Pasca Krisis Ekonomi pada Tahun 2000-2010“**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang kondisi dan situasi diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah penelitian sebagai berikut ;

1. Bagaimanakah dampak pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, investasi swasta, dan tingkat upah minimum regional (UMR) terhadap pengangguran di Sumatera Barat pada tahun 2000-2010.
2. Bagaimanakah pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, investasi swasta, dan tingkat upah minimum regional (UMR) secara bersama-sama dapat mempengaruhi tingkat pengangguran di Sumatera Barat pada tahun 2000-2010.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dampak pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, investasi swasta, dan tingkat upah minimum regional (UMR) terhadap pengangguran di Sumatera Barat pada tahun 2000-2010.
2. Untuk mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, investasi swasta dan tingkat upah minimum regional (UMR) secara bersama-sama mempengaruhi tingkat pengangguran di Sumatera Barat pada tahun 2000-2010.



**Bab II : KERANGKA TEORI**

Membahas tentang tinjauan pustaka yang memuat landasan teori mengenai tenaga kerja, pengertian dan jenis-jenis pengangguran, konsep pertumbuhan ekonomi,, konsep pertumbuhan penduduk, konsep investasi, dan teori upah, serta studi literature dan hipotesa.

**Bab III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bagian ini menjelaskan data dan sumber data, pembentukan model, definisi operasional variabel dan metode pengolahan dan analisis data.

**Bab IV : TINJAUAN UMUM**

Menguraikan keadaan perekonomian Sumatera Barat, serta perkembangan upah minimum regional dan pertumbuhan ekonomi serta tingkat investasi swasta dan pasar tenaga kerja di Sumatera Barat.

**Bab V : PENEMUAN EMPIRIS DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN**

Menguraikan tentang hasil penemuan empiris dari variabel-variabel yang diuji dan menjelaskan beberapa implikasi kebijakan.

**Bab VI : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini diuraikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

## BAB II

### LANDASAN TEORI DAN STUDI LITERATUR

#### 2.1 Landasan teori

##### 2.1.1 Konsep Tenaga Kerja dan Pengangguran

Tenaga kerja (*manpower*) dipilah kedalam dua kelompok yaitu angkatan kerja (*labor force*) dan bukan angkatan kerja. Yang termasuk angkatan kerja ialah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang bekerja, atau mempunyai pekerjaan namun untuk sementara sedang tidak bekerja dan yang mencari pekerjaan. Sedangkan yang termasuk bukan angkatan kerja ialah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan tidak sedang mencari pekerjaan; yakni orang-orang yang kegiatannya bersekolah (pelajar, mahasiswa), mengurus rumah tangga, serta menerima pendapatan tetapi bukan imbalan langsung atas jasa kerjanya, seperti pensiunan (Dumairy, 1996).

Sedangkan menurut Simanjuntak (1998), angkatan kerja (*labor force*) adalah seluruh penduduk yang berumur 15 tahun keatas yang mempunyai kegiatan terbanyak adalah bekerja dan mencari pekerjaan. Yang termasuk angkatan kerja adalah ;

1. Golongan yang bekerja (*employed person*)
2. Golongan yang menganggur dan mencari kerja.

Sedangkan bukan angkatan kerja adalah penduduk yang mempunyai kegiatan terbanyak tidak bekerja, tidak mencari kerja atau yang bersekolah. Yang termasuk bukan angkatan kerja adalah :

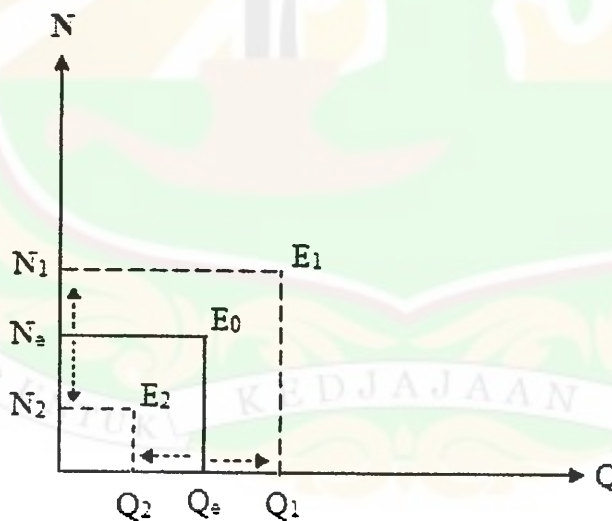
1. Golongan yang bersekolah
2. Golongan yang mengurus rumah tangga
3. Golongan lain-lain atau penerima pendapatan

Menurut Dumairi (1996 : 74), angkatan kerja adalah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang bekerja, atau mempunyai pekerjaan namun untuk sementara sedang tidak bekerja, dan yang mencari pekerjaan.

### 1. Pasar Tenaga Kerja

Dalam teori Keynes (Boediono, 2001), pasar tenaga kerja mengikuti pasar barang. Apabila output ( $Q$ ) naik maka jumlah orang yang mendapat pekerjaan atau tingkat employment ( $N$ ) juga naik. Sebaliknya,  $N$  turun apabila  $Q$  turun.

**Gambar 1.1 Pasar Tenaga Kerja Mengikuti Pasar Barang**



Gambar 1.1 menggambarkan kondisi tingkat employment dan tingkat output berada pada keseimbangan ( $N_e$ ,  $Q_e$ ) dengan titik equilibrium berada di  $E_0$ . Pada saat output naik ( $Q_e - Q_1$ ), maka jumlah orang yang mendapat pekerjaan atau tingkat employment juga akan meningkat ( $N_e - N_1$ ), dan titik keseimbangan

berada pada  $E_1$ . Begitupun sebaliknya, tingkat employment akan turun ( $N_e - N_2$ ) apabila tingkat output turun ( $Q_e - Q_2$ ), dengan titik keseimbangan berada pada titik  $E_2$ .

## 2. Kualitas dan Kuantitas Tenaga Kerja

“Kualitas” tenaga kerja atau yang sering disebut *modal manusia* menyangkut beberapa aspek. Salah satu di antaranya menyangkut perbaikan kesehatan dan usia panjang rata-rata penduduk. Tak dapat disangkal lagi bahwa perbaikan kesehatan telah meningkatkan produktivitas per jam tenaga kerja. Pada saat yang sama, umur normal yang semakin panjang yang tidak sebanding dengan kenaikan masa bekerja, telah menciptakan kelompok usia tak bekerja yang semakin besar.

Aspek kedua kualitas modal manusia menyangkut pendidikan teknik, mulai dari belajar mengoperasikan mesin hingga belajar untuk menjadi ahli ilmu pengetahuan. Terbukti apabila produktivitas telah mengalami perbaikan apabila masyarakat tidak lagi buta huruf dan pada umumnya, semakin lama orang menjalani pendidikan, maka orang itu semakin mampu menyesuaikan diri terhadap tantangan-tantangan baru yang terus berubah, sehingga dalam jangka panjang akan menjadi semakin produktif.

“kuantitas” tenaga kerja menyangkut jumlah penduduk suatu negara dan tingkat keikutsertaannya di dalam angkatan kerja penting bagi mereka sendiri, bukan semata-mata karena mereka mempengaruhi kuantitas faktor produksi. Jadi jelas bahwa pada tingkat pengetahuan dan ketersediaan faktor produksi tertentu,





Menurut Edwards, 1974 (dikutip dari Arsyad,1997), bentuk-bentuk pengangguran adalah:

1. Pengangguran terbuka (open unemployment), adalah mereka yang mampu dan seringkali sangat ingin bekerja tetapi tidak tersedia pekerjaan yang cocok untuk mereka.
2. Setengah pengangguran (under unemployment), adalah mereka yang secara nominal bekerja penuh namun produktivitasnya rendah sehingga pengurangan dalam jam kerjanya tidak mempunyai arti atas produksi secara keseluruhan.
3. Tenaga kerja yang lemah (impaired), adalah mereka yang mungkin bekerja penuh tetapi intensitasnya lemah karena kurang gizi atau penyakit.
4. Tenaga kerja yang tidak produktif, adalah mereka yang mampu bekerja secara produktif tetapi tidak bisa menghasilkan sesuatu yang baik.

Menurut Tambunan (2001), pengangguran dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan dengan berbagai cara, antara lain:

1. Jika rumah tangga memiliki batasan likuiditas yang berarti bahwa konsumsi saat ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan saat ini, maka bencana pengangguran akan secara langsung mempengaruhi income poverty rate dengan consumption poverty rate.
2. Jika rumah tangga tidak menghadapi batasan likuiditas yang berarti bahwa konsumsi saat ini tidak terlalu dipengaruhi oleh pendapatan saat ini, maka peningkatan pengangguran akan menyebabkan peningkatan kemiskinan dalam jangka panjang, tetapi tidak terlalu berpengaruh dalam jangka pendek.

Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat menyebabkan masalah pengangguran yang ada di negara yang sedang berkembang menjadi semakin serius. Tingkat pengangguran terbuka sekarang ini yang ada di negara yang sedang berkembang seperti Indonesia rata-rata sekitar 10 persen dari seluruh angkatan kerja di perkotaan. Masalah ini dipandang lebih serius lagi bagi mereka yang berusia antara 15 - 24 tahun yang kebanyakan mempunyai pendidikan yang lumayan.

Namun demikian, tingkat pengangguran terbuka di perkotaan hanya menunjukkan aspek-aspek yang tampak saja dari masalah kesempatan kerja di negara yang sedang berkembang yang bagaikan ujung sebuah gunung es. Apabila mereka tidak bekerja konsekuensinya adalah mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan dengan baik, kondisi seperti ini membawa dampak bagi terciptanya dan membengkaknya jumlah kemiskinan yang ada.

Ada hubungan yang erat sekali antara tingginya tingkat pengangguran, luasnya kemiskinan, dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Bagi sebagian besar mereka, yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap atau hanya bekerja paruh waktu (part time) selalu berada diantara kelompok masyarakat yang sangat miskin. Mereka yang bekerja dengan bayaran tetap di sektor pemerintah dan swasta biasanya termasuk diantara kelompok masyarakat kelas menengah ke atas. Namun demikian, adalah salah jika beranggapan bahwa setiap orang yang tidak mempunyai pekerjaan adalah miskin, sedang yang bekerja secara penuh adalah orang kaya. Hal ini karena kadangkala ada pekerja di perkotaan yang tidak bekerja secara sukarela karena mencari pekerjaan yang lebih baik yang lebih sesuai

dengan tingkat pendidikannya. Mereka menolak pekerjaan yang mereka rasakan lebih rendah dan mereka bersikap demikian karena mereka mempunyai sumber lain yang bisa membantu masalah keuangan mereka (Arsyad, 1997).

Sukirno (2004: 14), menyatakan akibat-akibat buruk yang ditimbulkan oleh pengangguran pada kegiatan perekonomian, antara lain:

1. Pengangguran menyebabkan masyarakat mengurangi tingkat kemakmuran yang mereka capai.
2. Pengangguran menyebabkan kekacauan sosial dan politik.
3. Pengangguran tidak menggalakkan pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

Akibat buruk lain yang dapat ditimbulkan oleh pengangguran berdampak pada individu dan masyarakat (Sukirno, 2004), yaitu :

1. Pengangguran mengurangi pendapatan masyarakat.
2. Pengangguran menimbulkan efek yang buruk kepada kesejahteraan masyarakat.
3. Pengangguran dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk ke atas diri penganggur dan keluarganya .

Konsepsi Keynes mengenai bekerjanya pasar tenaga kerja berbeda dengan konsepsi kaum klasik khususnya dalam hal kemungkinan bahwa pengangguran bisa berlarut-larut (Boediono, 2001).

Kaum klasik mengenal tiga macam pengangguran :

1. Pengangguran yang timbul karena pergeseran tingkat output dari berbagai sektor dan bersifat sementara (*frictional unemployment*).

2. Pengangguran musiman, yang datang dan hilang menurut musim (*seasonal unemployment*).
3. Pengangguran yang “dibuat” orang, misalnya dengan adanya peraturan upah minimum atau tindakan dari serikat buruh yang berusaha mempertahankan tingkat upah di atas tingkat yang mempertemukan permintaan dan penawaran tenaga kerja (*institutional unemployment*).

### 2.1.2 Konsep Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Prof. Simon Kuznets (dikutip dari Boediono, 1999) pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan), dan ideologi terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada.

Hal tersebut menjadikan pertumbuhan ekonomi dicirikan dengan 3 hal pokok, antara lain:

1. Laju pertumbuhan perkapita dalam arti nyata (riil).
2. Persebaran atau distribusi angkatan kerja menurut sektor kegiatan produksi yang menjadi sumber nafkahnya.
3. Pola persebaran penduduk.

Boediono (1999) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah salah satu proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang dimana penekanannya pada 3 aspek, antara lain:



1. Proses, yaitu pertumbuhan ekonomi bukan merupakan suatu gambaran dari suatu perekonomian yang melihat bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu.
2. Output per kapita, yaitu pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan adanya kenaikan output per kapita dalam hal ini ada dua unsur yang penting seperti output total dan jumlah penduduk.
3. Jangka waktu, yaitu kenaikan output per kapita selama 1 – 2 tahun lalu diikuti penurunan output per kapita bukan merupakan pertumbuhan ekonomi. Dikatakan tumbuh bila dalam jangka waktu yang lama (5 tahun atau lebih) mengalami kenaikan output per kapita.

Menurut Todaro (dikutip dari Tambunan, 2001) sampai akhir tahun 1960, para ahli ekonomi percaya bahwa cara terbaik untuk mengejar keterbelakangan ekonomi adalah dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya sehingga dapat melampaui tingkat pertumbuhan penduduk. Dengan cara tersebut, angka pendapatan per kapita akan meningkat sehingga secara otomatis terjadi pula peningkatan kemakmuran masyarakat dan pada akhirnya akan mengurangi jumlah penduduk miskin. Akibatnya, sasaran utama dalam pembangunan ekonomi lebih ditekankan pada usaha-usaha pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Akan tetapi, pembangunan yang dilakukan pada negara yang sedang berkembang sering mengalami dilema antara pertumbuhan dan pemerataan. Pembangunan ekonomi mensyaratkan pendapatan nasional yang lebih tinggi dan untuk itu tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi merupakan pilihan yang harus diambil. Namun yang menjadi permasalahan bukan

permasalahan bukan hanya soal bagaimana cara memacu pertumbuhan, tetapi juga siapa yang melaksanakan dan berhak menikmati hasilnya.

Pendekatan pembangunan tradisional lebih dimaknai sebagai pembangunan yang lebih memfokuskan pada peningkatan PDRB suatu provinsi, kabupaten, atau kota. Sedangkan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan angka PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Saat ini umumnya PDRB baru dihitung berdasarkan dua pendekatan, yaitu dari sisi sektoral / lapangan usaha dan dari sisi penggunaan. Selanjutnya PDRB juga dihitung berdasarkan harga berlaku dan harga konstan. Total PDRB menunjukkan jumlah seluruh nilai tambah yang dihasilkan oleh penduduk dalam periode tertentu.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedang Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu.

Cara penyajian Produk Domestik Regional Bruto disusun dalam dua bentuk, yaitu :

1. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan

Menurut BPS pengertian Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan yaitu jumlah nilai produksi atau pengeluaran atau

pendapatan yang dihitung menurut harga tetap. Dengan cara menilai kembali atau mendefinisikan berdasarkan harga-harga pada tingkat dasar dengan menggunakan indeks harga konsumen. Dari perhitungan ini tercermin tingkat kegiatan ekonomi yang sebenarnya melalui Produk Domestik Regional Bruto riilnya.

## 2. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku

Pengertian Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku menurut BPS adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Yang dimaksud nilai tambah yaitu merupakan nilai yang ditambahkan kepada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam proses produksi sebagai input antara. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa atas ikut sertanya factor produksi dalam proses produksi.

### 2.1.3 Konsep Pertumbuhan Penduduk

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap (BPS).

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu di bandingkan waktu sebelumnya.

Apabila diperhatikan secara seksama, maka masalah kependudukan di Indonesia ditandai oleh beberapa ciri (karakteristik) :

1. Besar dan cepatnya laju perkembangan penduduk

Seperti halnya negara-negara lain terutama negara-negara yang sedang berkembang, maka Indonesia pada akhir abad ke-20 tidak luput dari gejala "Peledakan Penduduk" (*Population explosion*). Cepatnya perkembangan penduduk disamping disebabkan oleh tingginya tingkat kelahiran, juga disebabkan oleh menurunnya tingkat kematian.

2. Penyebaran penduduk yang tidak merata

Kenyataan menunjukkan bahwa penyebaran penduduk tidak seimbang antara daerah (pulau) yang satu dengan daerah (pulau) yang lain. Keadaan ini menimbulkan perbedaan yang besar pada tingkat kepadatan penduduk antara berbagai daerah (pulau).

3. Komposisi penduduk menurut usia dan kelamin

Ditinjau dari segi komposisi usia, maka tingkat fertilitas yang tinggi membawa akibat yang cukup gawat. Banyaknya penduduk pada kelompok usia tidak produktif sangat besar artinya bagi kehidupan masyarakat. Penduduk yang produktif adalah dari golongan usia kerja (15 - 64 tahun). Besarnya perbandingan antara penduduk usia produktif dan penduduk belum/tidak produktif akan menunjukkan angka beban ketergantungan. Begitu juga dengan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Apabila komposisi penduduk wanita lebih tinggi dari



penduduk laki-laki maka menunjukkan suatu potensi perkembangan penduduk yang tinggi.

#### 4. Arus urbanisasi yang tinggi

Terjadinya urbanisasi disebabkan oleh banyak hal, salah satu di antaranya adalah keinginan di kalangan orang-orang di daerah pedesaan untuk mengadu nasib dan mengejar kemungkinan kehidupan yang lebih baik di kota-kota besar. Merosotnya tingkat hidup akibat relatif tingginya tingkat kelahiran di daerah pedesaan terutama disebabkan oleh menurunnya luas tanah garapan per kapita (*land-man ratio*) di sektor pertanian. Ini merupakan salah satu pendorong yang menyebabkan sebagian penduduk daerah pedesaan pindah ke kota-kota besar guna mengejar kehidupan yang lebih baik. Adanya arus perpindahan ini menyebabkan cepatnya perkembangan penduduk di daerah perkotaan. Cepatnya perkembangan penduduk di daerah perkotaan selain disebabkan oleh urbanisasi, juga disebabkan tingginya pertambahan alami penduduk daerah perkotaan itu sendiri.

Perkembangan penduduk yang cepat mempunyai implikasi pada berbagai bidang seperti tenaga kerja, pendidikan, kesehatan, pangan, perumahan dan lain-lain. Bertambahnya penduduk dengan cepat mengakibatkan tekanan pada sektor penyediaan fasilitas pada masing-masing bidang tersebut, baik kuantitatif maupun kualitatif. Mengingat kemampuan masyarakat yang masih sangat terbatas terutama disegi sumber-sumber pembiayaan, maka perlu diadakan Keluarga Berencana guna memperlambat laju perkembangan penduduk ini (Elfindri, 2004)

Dengan berhasilnya Keluarga Berencana memperlambat laju perkembangan penduduk, maka biaya-biaya yang sedianya diperuntukkan penyediaan fasilitas guna mengejar kebutuhan masyarakat yang meningkat akibat cepatnya perkembangan penduduk itu, dapat di-realokasikan untuk kepentingan-kepentingan lainnya atau untuk menaikkan kualitas dari pada fasilitas-fasilitas tersebut. Perbaikan dalam bidang-bidang tersebut secara kuantitatif maupun kualitatif, terutama bidang pendidikan dan kesehatan, merupakan *human investment* yang kelak akan menghasilkan generasi pembangunan yang berkualitas tinggi baik fisik maupun mental spiritual.

Penduduk merupakan sumber tenaga kerja yang merupakan salah satu faktor produksi (*input*). Dampak positif dari pertumbuhan penduduk ini adalah menunjukkan peningkatan pasokan tenaga kerja dan permintaan barang dan jasa. Faktor demografi merupakan suatu penyebab meningkatnya pengangguran. Dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi secara otomatis akan menambah jumlah angkatan kerja. Hal ini jika tidak diimbangi dengan pertumbuhan kesempatan kerja baru maka akan berdampak pada naiknya pengangguran..Sebab jumlah penduduk berhubungan positif dengan jumlah angkatan kerja.

Menurut Maltus (dikutip dalam Lincolin Arsyad, 1997) kecenderungan umum penduduk suatu negara untuk tumbuh menurut deret ukur yaitu dua-kali lipat setiap 30-40 tahun. Sementara itu pada saat yang sama, karena hasil yang menurun dari faktor produksi tanah, persediaan pangan hanya tumbuh menurut deret hitung. Oleh karena pertumbuhan persediaan pangan tidak bisa

mengimbangi pertumbuhan penduduk yang sangat cepat dan tinggi, maka pendapatan perkapita (dalam masyarakat tani didefinisikan sebagai produksi pangan perkapita) akan cenderung turun menjadi sangat rendah, yang menyebabkan jumlah penduduk tidak pernah stabil, atau hanya sedikit diatas tingkat subsiten

Menurut Maier (dikutip dari Kuncoro, 1997) dikalangan para pakar pembangunan telah ada konsensus bahwa laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak hanya berdampak buruk terhadap suplai bahan pangan, namun juga semakin membuat kendala bagi pengembangan tabungan, cadangan devisa, dan sumberdaya manusia.

Terdapat tiga alasan mengapa pertumbuhan penduduk yang tinggi akan memperlambat pembangunan:

1. Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan dibutuhkan untuk membuat konsumsi dimasa mendatang semakin tinggi. Rendahnya sumberdaya perkapita akan menyebabkan penduduk tumbuh lebih cepat, yang gilirannya membuat investasi dalam "kualitas manusia" semakin sulit.
2. Banyak negara dimana penduduknya masih sangat tergantung dengan sektor pertanian, pertumbuhan penduduk mengancam keseimbangan antara sumberdaya alam yang langka dan penduduk. Sebagian karena pertumbuhan penduduk memperlambat perpindahan penduduk dari sektor pertanian yang rendah produktifitasnya ke sektor pertanian modern dan pekerjaan modern lainnya.

3. Pertumbuhan penduduk yang cepat membuat semakin sulit melakukan perubahan yang dibutuhkan untuk meningkatkan perubahan ekonomi dan sosial. Tingginya tingkat kelahiran merupakan penyumbang utama pertumbuhan kota yang cepat. Bermekarnya kota-kota di NSB membawa masalah-masalah baru dalam menata maupun mempertahankan tingkat kesejahteraan warga kota.

#### **2.1.4 Konsep Investasi**

Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pengeluaran penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian (Sukirno, 2004). Pertambahan jumlah barang modal ini memungkinkan perekonomian tersebut menghasilkan lebih banyak barang dan jasa di masa yang akan datang. Adakalanya penanaman modal dilakukan untuk menggantikan barang-barang modal yang lama yang telah haus dan perlu didepresiasi.

Investasi atau penanaman modal merupakan langkah awal dari kegiatan produksi bahkan merupakan kegiatan awal pembangunan. Penanaman modal tidak hanya dilakukan oleh masyarakat ataupun pihak swasta tetapi juga berasal dari pemerintah.

Investasi ini merupakan suatu yang dinamis, tidak hanya merupakan pembiayaan asset tetapi meliputi keseluruhan prosesnya dalam jangka panjang. Banyak manfaat yang bisa diperoleh dari suatu investasi diantaranya adalah



penyebaran tenaga kerja, peningkatan kesempatan kerja, peningkatan produksi yang akan meningkatkan perusahaan atau pendapatan masyarakat yang akan mempengaruhi devisa negara. Hal yang terjadi selanjutnya adalah peningkatan devisa negara yang akan meningkatkan pendapatan nasional.

Fungsi investasi mempengaruhi berbagai segi kehidupan dalam memacu pembangunan nasional, bukan hanya dalam segi ekonomi tetapi dalam bidang-bidang lainnya. Berdasarkan Himpunan Pidato Presiden RI, yang dikeluarkan Departemen Penerangan RI tahun 1985, fungsi-fungsi investasi adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendorong berkembangnya struktur industri kecil yang lebih kokoh dengan memberikan prioritas kepada industri yang membuat barang modal dan bahan baku.
2. Untuk memanfaatkan semaksimal mungkin potensi sumber daya baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, sehingga industri berakar dengan kuat dan memiliki daya saing yang handal.
3. Untuk menghasilkan barang-barang ekspor dan untuk melancarkan fungsi ini dorongan dan bantuan diberikan pemerintah.
4. Untuk membuka pusat-pusat kegiatan perekonomian dan menggali sumber daya alam yang masih terpendam dan terkait dengan program transmigrasi.
5. Untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup dan pencegahan pencemaran lingkungan.
6. Untuk menyerap tenaga kerja serta meningkatkan mutu dan kualitas tenaga kerja.

7. Untuk pengembangan teknologi dalam usaha untuk modernisasi kehidupan masyarakat.

Proses pembangunan di negara-negara sedang berkembang memiliki masalah yang sama yaitu kekurangan dana investasi. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya tingkat pendapatan masyarakat sehingga tabungan masyarakat juga rendah. Dalam menyikapi masalah ini, pemerintah mengupayakan dana dari luar negeri, maupun tabungan dalam negeri yang tetap merupakan dana utama pembangunan.

Sumber investasi ditinjau dari segi sifat yaitu:

1. Investasi yang bersifat budgeter, yaitu investasi yang melalui APBN.
2. Investasi yang bersifat non budgeter yaitu investasi langsung tanpa melalui APBN, yang dibedakan atas investasi asing (Penanaman Modal Asing/PMA) dan investasi dalam negeri (Penanaman Modal Dalam Negeri/PMDN).

Pembangunan ekonomi memerlukan pengolahan kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil melalui penanaman modal yang insentif, yang diarahkan kepada usaha-usaha pembaharuan dan perluasan pembangunan dan produksi. Masalah dan persoalan yang dihadapi oleh setiap negara dalam pelaksanaan usaha-usaha tersebut memerlukan pemanfaatan potensi modal, teknologi/ pengetahuan, keterampilan dan kemampuan manajemen dari luar negeri yang tidak terlepas juga dari kebutuhan pendayagunaan dan pemasaran modal dalam negeri secara maksimal yang dimiliki negara, swasta nasional dan swasta asing.

Pemasaran modal dalam negeri yang dimiliki oleh negara atau pemerintah dalam tulisan ini diukur berdasarkan pembentukan modal tetap bruto (investasi pemerintah). Pembentukan modal tetap bruto mencakup pengadaan, pembuatan atau pembelian barang modal baru dalam negeri dan barang modal baru ataupun bekas dari luar negeri (Dumairy, 1996).

Pembentukan modal tetap bruto dibedakan atas:

1. Pembentukan modal tetap berupa bangunan/konstruksi;
2. Pembentukan modal tetap berupa mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan, baik yang berasal dari impor maupun hasil produksi dalam negeri.

Selain peranan pemerintah, pihak swasta juga berperan penting dalam memberikan investasi yang akan menunjang pembangunan. Pentingnya peranan pihak swasta atau yang sering disebut dunia usaha dalam pembangunan ekonomi disebabkan oleh arah pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah terutama ditujukan kepada pembangunan sarana dan prasarana ekonomi (*Social Overhead Cost*) sedangkan investasi swasta lebih terfokus pada aspek-aspek produktif perekonomian (*Economic Overhead Cost*). Investasi swasta lebih dikenal dengan istilah PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) dan PMA (Penanaman Modal Asing).

Pengertian Penanaman Modal Asing sesuai dengan UU No. 1 / 1967, yaitu:

1. Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.

2. Alat-alat untuk perusahaan termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai oleh kekayaan devisa Indonesia.
3. Bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan UU ini, diperkenankan ditransfer tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.

Sedangkan pengertian Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan UU No. 6 / 1968, adalah sebagai berikut:

1. Bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-hak dan benda, baik yang dimiliki oleh negara maupun swasta asing yang berdomisili di Indonesia, yang disisihkan/disediakan guna menjalankan suatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur oleh ketentuan-ketentuan, pasal-pasal dan UU No. 1 / 1967 tentang PMA.
2. Pihak swasta yang memiliki modal dalam negeri tersebut pasal 1 ayat 1 UU ini dapat terdiri atas perorangan dan atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

Investasi ini, baik investasi pemerintah, PMDN serta PMA, akan menimbulkan kesempatan kerja baru. Usaha memperluas kesempatan kerja ditentukan oleh laju pertumbuhan investasi, laju pertumbuhan penduduk dan masalah produktifitas kerja. Namun determinan yang paling penting dalam mempengaruhi perluasan kesempatan kerja adalah investasi.

Sukirno (2000) menyatakan bahwa ada tiga fungsi penting investasi dalam perekonomian yaitu pertama, kenaikan investasi sebagai salah satu komponen dari



pengeluaran agregat akan meningkatkan permintaan agregat dan pendapatan nasional. Selanjutnya akan diikuti oleh penambahan kesempatan kerja. Kedua, penambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas memproduksi di masa depan, sehingga akan mendorong pertumbuhan produksi nasional dan kesempatan kerja. Ketiga, perkembangan investasi yang selalu diikuti oleh perkembangan teknologi, akan memberikan sumbangan penting bagi kenaikan produktifitas dan pendapatan perkapita masyarakat.

Keynes (dikutip dari Hoppe, 2001), menyebutkan bahwa investasi dapat meningkatkan permintaan agregat. Selain itu, juga mempengaruhi penawaran agregat melalui pengaruhnya terhadap kapasitas produksi. Perubahan kapasitas produksi inilah yang akan mempengaruhi permintaan tenaga kerja atau akan adanya kesempatan kerja baru bagi masyarakat. Peningkatan investasi akan menambah kapasitas produksi sehingga menaikkan kesempatan kerja.

### **2.1.5 Teori Upah**

Upah adalah balas jasa yang dibayarkan kepada pekerja harian dengan berpedoman atas perjanjian yang disepakati membayarnya (Melayu, 2003). Upah bagi para pekerja memiliki 2 sisi manfaat yaitu sebagai perangsang bagi peningkatan produktifitas. Sebagai imbalan, upah merupakan hak bagi para pekerja terhadap tenaga atau pikiran yang telah dikeluarkan. Definisi pada UU 13 tahun 2003 pada pasal 1 ayat 30 tentang ketenagakerjaan yang berbunyi: *“Upah adalah hak pekerja yang yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan*

*menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan terasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau yang akan dilakukan”.*

PP No. 8/1981 memberikan pengertian mengenai upah, upah minimum dan upah pokok sebagai berikut:

Upah : Suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerja atau jasa yang telah atau akan dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan termasuk tunjangan, baik untuk karyawan itu sendiri maupun keluarga.

Upah minimum : Merupakan upah yang ditetapkan secara minimum regional sektoral maupun sub-sektoral. Dalam hal ini upah minimum itu adalah upah pokok atau tunjangan.

Upah minimum pokok : Upah minimum pokok yang diatur secara minimal baik regional, sektoral maupun sub sektoral. Dalam peraturan pemerintah yang diatur secara jelas hanya upah pokoknya saja dan tidak termasuk tunjangan.

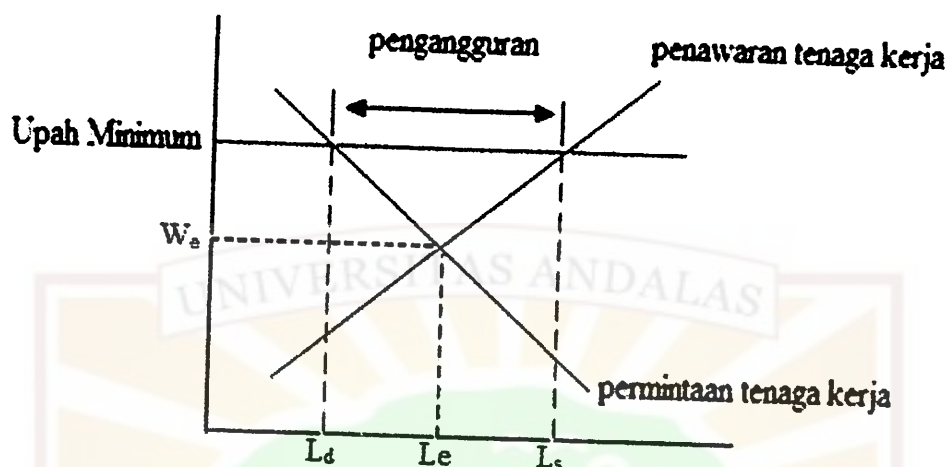
Sistem pengupahan disuatu negara biasanya didasarkan pada falsafah atau teori yang dibuat oleh negara itu. Di Indonesia, sistem pengupahan dilandaskan pada pasal 27 ayat 2 UUD dan penjabarannya dalam hubungan industrial pancasila. Sistem pengupahan pada prinsipnya haruslah: (1). Mampu menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya; (2). Mencerminkan

pemberian imbalan terhadap hasil kerja seseorang; dan (3). Menurut pemberian insentif yang mendorong peningkatan produktivitas kerja dan pendapatan nasional (Simanjuntak, 1998).

Hubungan antara tingkat kenaikan upah dan tingkat pengangguran dapat digambarkan melalui kurva Philips. Dari studi yang dilakukan oleh A.W Philips (Mankiw, 2003) didapat kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara kenaikan tingkat upah dengan tingkat pengangguran. Menurut teori ekonomi klasik, ketika pemerintah menetapkan peraturan upah minimum sehingga 'memaksa' upah tetap berada di atas tingkat yang menyeimbangkan penawaran dan permintaan, peraturan tersebut menyebabkan kuantitas pekerja yang ditawarkan meningkat sedangkan jumlah tenaga kerja yang diminta menjadi turun. Terjadilah kelebihan tenaga kerja.

Dalam pasar tenaga kerja, upah yang menyeimbangkan permintaan dan penawaran tenaga kerja adalah  $W_e$ . Pada tingkat upah ekuilibrium ini jumlah tenaga kerja yang diminta dan ditawarkan adalah sama yaitu  $L_e$ . Namun, jika upah 'dipaksa' naik misal dengan adanya peraturan upah minimum sehingga kuantitas pekerja yang ditawarkan naik menjadi  $L_s$  dan jumlah pekerja yang diminta turun menjadi  $L_d$ . Kelebihan penawaran inilah yang menyebabkan terjadinya pengangguran (Tjiptoherijanto, 1990).

**Gambar 1.3** Pengangguran akibat peraturan upah minimum



**Sumber : Tjiptoherijanto (1990)**

Menurut teori efisiensi upah, upah dapat meningkatkan produktivitas pekerja. Upah yang lebih tinggi akan membuat pekerja lebih produktif. Selain itu, upah yang lebih tinggi dapat mengurangi perputaran tenaga kerja. Karena pekerja akan keluar dari pekerjaan dengan alasan ingin mendapat tingkat upah yang lebih baik, atau pekerjaan yang lebih baik jika tingkat upah di tempat dia bekerja lebih rendah daripada di tempat lain untuk jenis pekerjaan yang sama.

### **2.1.6 Kerangka Pikir**

Dari faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran yang diuraikan pada teori dan penelitian terdahulu diatas maka penulis mencoba menarik keterkaitan atau hubungan antara pendapatan daerah (PDRB) dengan perluasan kesempatan kerja dapat dilihat secara makro. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per tahun yang merupakan jumlah barang dan jasa yang dapat dihasilkan oleh faktor produksi dalam satu tahun. Permintaan agregat yang terdiri dari Konsumsi, Investasi dan



Pengeluaran Pemerintah meningkat seiring dengan kenaikan pendapatan nasional. Dalam suatu proses produksi kenaikan permintaan ini akan meningkatkan jumlah investasi yang akhirnya akan meningkatkan jumlah produksi yang dihasilkan

Faktor tingkat upah masuk ke dalam penelitian ini karena secara teoritis permintaan tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh tingkat upah. Ditinjau dari faktor upah, selama ini masalah yang sering timbul dalam hal pengupahan adalah adanya perbedaan pengertian dan kepentingan mengenai upah antara pengusaha dan pekerja. Sehingga dalam hal ini diperlukan kebijakan pemerintah untuk mengatasi perbedaan kepentingan tersebut. Perbaikan upah berarti peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat. Peningkatan pendapatan masyarakat akan meningkatkan permintaan akan barang dan jasa yang kemudian pada gilirannya secara makro mendorong perusahaan untuk berkembang

Faktor demografi merupakan suatu penyebab meningkatnya pengangguran. Dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi secara otomatis akan menambah jumlah angkatan kerja. Hal ini jika tidak diimbangi dengan pertumbuhan kesempatan kerja baru maka akan berdampak pada naiknya pengangguran. Sebab jumlah penduduk berhubungan positif dengan jumlah angkatan kerja

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mencoba menarik beberapa faktor yang menjadi penentu pengangguran yaitu naik turunnya pendapatan daerah yang tercermin dari laju pertumbuhan perekonomian, faktor pertumbuhan penduduk (Faktor Demografi), faktor investasi swasta dan faktor upah minimum regional (UMR).

## 2.2 Studi Literatur

Penelitian yang dilakukan oleh Oluyomi Ayoyinka Sodipe and Oluranti Isaiah Ogunrinola (Sodipe, dkk, 2011) dengan judul “ *Employment and Economic Growth Nexus in Nigeria*”. Tulisan mereka menganalisis hubungan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi dalam perekonomian Nigeria. Hasil analisis ekonometrik mereka menunjukkan bahwa adanya hubungan positif dan signifikan antara tingkat kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi dan adanya hubungan yang negatif antara tingkat pertumbuhan lapangan kerja dan tingkat pertumbuhan PDB dalam perekonomian Nigeria. Mereka menyimpulkan strategi investasi untuk meningkatkan promosi tenaga kerja akan membantu untuk mengurangi pengangguran terbuka yang tinggi saat ini di Nigeria.

Penelitian yang dilakukan Badi H. Baltagi, Yusuf Soner BAŞKAYA dan Timur HÜLAGÜ (Baltagi, dkk, 2011) dengan judul “*The Turkish Wage Curve: Evidence from the Household Labor Force Survey*”. Tulisan mereka menganalisis tentang kurva upah rumah tangga di Turki. Menggunakan data tingkat kekayaan individu dari Survei Angkatan Kerja Rumah Tangga di Turki, penelitian mereka menunjukkan bahwa upah per jam pekerja yang lebih muda, kurang berpengalaman dan pekerja kurang berpendidikan lebih sensitif terhadap variasi pengangguran dibanding pekerja yang lebih tua, lebih berpengalaman, dan lebih terdidik. Mereka juga menemukan bahwa upah perempuan di Turki lebih sensitif terhadap tingkat pengangguran daripada upah laki-laki selama periode 2005-2008.

Penelitian yang dilakukan T. Hussain, M. W. Siddiqi dan A. Iqbal (Hussain, dkk, 2010), dalam jurnal yang berjudul “*A Coherent Relationship*

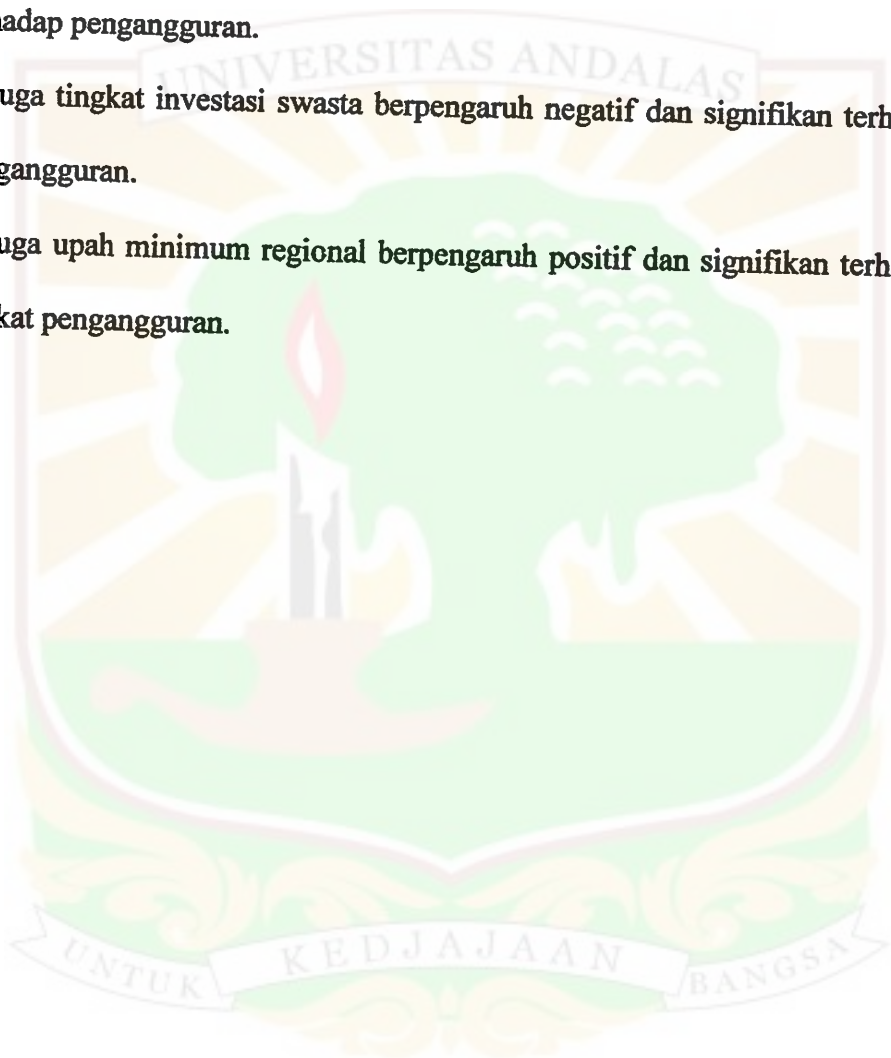
*between Economic Growth and Unemployment: An Empirical Evidence from Pakistan*". Penelitian mereka menunjukkan bahwa dalam jangka pendek dan jangka panjang ada hubungan kausal antara pertumbuhan dan pengangguran termasuk modal, tenaga kerja dan modal manusia sebagai variabel penjelas. Pertumbuhan dianggap sebagai jalur untuk mengurangi tingkat pengangguran.

Shahnawaz Malik , Shahzad Hussain, Muhammad Khizar Hayat (Malik, dkk, 2011), dalam jurnal yang berjudul "*Demographic Transition and Economic Growth in Pakistan*". Penelitian mereka mengeksplorasi secara empiris hubungan antara variabel-variabel demografis dan pertumbuhan ekonomi Pakistan untuk periode 1972-2006, menggunakan waktu seri teknik ekonometrik. Penelitian mereka menunjukkan bahwa transisi demografis di Pakistan memiliki dampak besar pada pertumbuhan ekonomi. Pemahaman dari mekanisme transisi demografis adalah kunci untuk membuat rencana masa depan. Perubahan struktur keluarga, status perempuan dan anak-anak dan orang-orang cara kerja semua memberikan narasi yang kuat di mana kebijakan dapat dibingkai.

Ahmed Nawaz Hakro (Hakro, 2009) dalam jurnal yang berjudul "*Size of Government and Growth Rate of Per Capita Income in Selected Asian Developing Economics*". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah mendorong pertumbuhan, pengeluaran yang lebih besar dari pemerintah ini tentunya akan menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan pertumbuhan, kemudian pendapatan per kapita yang lebih besar. Tarif pajak yang lebih rendah atau beban bersama dengan mobilisasi sumberdaya melalui penerimaan pajak non pasti akan mendorong pertumbuhan.

### **2.3 Hipotesis**

- 1. Diduga laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran.**
- 2. Diduga laju pertumbuhan penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran.**
- 3. Diduga tingkat investasi swasta berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran.**
- 4. Diduga upah minimum regional berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran.**





## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder Sumatera Barat tahun 2000-2010. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Barat berupa publikasi-publikasi terdiri dari statistik keuangan pemerintah propinsi, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Depnakertrans juga menjadi sumber data Upah Minimum Regional (UMR)..

Data juga diperoleh dari studi kepustakaan melalui jurnal -jurnal dan tulisan -tulisan yang sesuai dengan studi ini. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat.
2. Penelitian berdasarkan data sekunder yang diperoleh dengan cara mengutip, mencatat, photo copy dari berbagai publikasi.
3. Selain itu data juga didapat dari internet.

#### **3.2 Metode Analisa dan Pembentukan Model**

##### **3.2.1 Analisis Deskriptif dan Induktif**

Analisis deskriptif yaitu teknik yang digunakan untuk menggambarkan suatu hal secara umum dan bertujuan untuk mempermudah penjelasan melalui tabel-tabel dan grafik. Teknik ini bertujuan untuk menggambarkan situasi ketenagakerjaan secara umum meliputi jumlah angkatan kerja, kesempatan kerja, dan pengangguran. Selain itu, juga untuk menggambarkan deskripsi variabel-

variabel yang mempengaruhi pengangguran yaitu pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, dan jumlah investasi swasta, serta upah minimum regional. Sedangkan analisis induktif adalah suatu teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian empiris yang telah dilakukan.

### 3.2.2 Analisis Regresi Berganda

Model yang digunakan adalah model ekonometrik untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran dengan menggunakan bantuan program SPSS. Data yang digunakan adalah data time series dengan estimasi model menggunakan *Ordinary Least Square (OLS)* yaitu teknik mengestimasi suatu garis regresi dengan jalan meminimalkan jumlah dari kuadrat kesalahan setiap observasi terhadap garis tersebut. Regresi bertujuan untuk menguji pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Variabel yang dipengaruhi disebut variabel dependen, sedangkan variabel yang mempengaruhi disebut variabel independen. Dalam regresi berganda, variabel independennya lebih dari satu variabel, serta memiliki satu variabel dependen.

Karena adanya keterbatasan data yang tersedia maka penulis hanya menggunakan beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran, yaitu: pertumbuhan ekonomi ( $Y_D$ ), Pertumbuhan penduduk ( $J_P$ ), investasi swasta ( $I_S$ ), dan UMR ( $w$ ). Sehingga fungsi pengangguran dapat ditulis sebagai berikut :

$$P = f(Y_D, J_P, I_S, w) \dots\dots\dots(1)$$

Berdasarkan penjelasan teoritis maka diharapkan bahwa pertumbuhan ekonomi ( $Y_D$ ), pertumbuhan penduduk ( $J_P$ ), investasi swasta ( $I_S$ ) dan upah

minimum regional ( $w$ ) berpengaruh terhadap tingkat pengangguran ( $P$ ) Sehingga model ekonometriknya dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_n X_n + e \quad (2)$$

Dimana :

$Y_t$  = Variabel tidak bebas

$X_{1,2,3,4,n}$  = Variabel bebas

$\beta_{0,1,2,3,4,n}$  = Koefisien regresi untuk variabel  $X_{1,2,3,4,n}$

$e$  = Faktor pengganggu

Model pengangguran yang akan diestimasi dalam penelitian ini adalah :

$$P = \beta_0 + \beta_1 Y_D + \beta_2 J_P + \beta_3 I_S + \beta_4 w + e \quad (3)$$

Dimana :

$\beta_0$  = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$  = Koefisien regresi untuk variabel  $Y_D, J_P, I_S$  dan  $w$

$P$  = Angka Pengangguran

$Y_D$  = Pertumbuhan Ekonomi

$J_P$  = Pertumbuhan Penduduk

$I_S$  = Investasi Swasta

$w$  = Upah Minimum Regional (UMR)

$e$  = faktor pengganggu

Persamaan (3) selanjutnya menggunakan regresi linear berganda yang bertujuan melihat hubungan variabel bebas dengan variabel terikat baik secara terpisah maupun bersama-sama, dan dengan regresi berganda ini akan diperoleh

besarnya koefisien masing-masing variabel, dari besarnya koefisien variabel inilah dapat dilihat ada tidaknya hubungan antara variabel bebas dan terikat, yang telah ditransformasi dalam bentuk logaritma dengan menggunakan kuadrat terkecil dengan menggunakan dengan formulasi sebagai berikut :

$$\text{Log } P = \beta_0 + \beta_1 \log Y_D + \beta_2 \log J_P + \beta_3 \log I_S + \beta_4 \log w + e \quad (4)$$

Dimana :

$\beta_0$	= Konstanta
P	= Tingkat Pengangguran
$Y_D$	= Pertumbuhan Ekonomi
$J_P$	= Pertumbuhan Penduduk
$I_S$	= Investasi Swasta
w	= Upah Minimum Regional (UMR)
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	= Koefisien masing-masing variable
e	= faktor pengganggu

### 3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Penelitian memakai waktu selama sebelas tahun yaitu tahun 2000-2010, maka periode yang diperhatikan untuk melihat perkembangan kualitas sumber daya manusia dari segi jumlah investasi swasta, tingkat upah minimum regional (UMR), pertumbuhan ekonomi, Pertumbuhan penduduk dan jumlah pengangguran selama periode tersebut di atas. Agar penelitian ini terarah dan tidak menimbulkan salah penafsiran, maka perlu dikemukakan definisi operasional variabel yang digunakan.



Variabel-variabel yang dipelajari dalam penelitian ini adalah:

1. **Dependent Variabel**, disini variabel terikat yang digunakan dalam model ini adalah pengangguran yang merupakan jumlah angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan atau belum mendapatkan pekerjaan dalam periode waktu tertentu (per tahun).

2. **Independent Variabel**

- Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan), dan ideologi terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada. Penduduk adalah semua orang yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu dalam periode tertentu (per tahun).
- Pertumbuhan penduduk adalah kenaikan jumlah penduduk dalam jangka panjang (BPS).
- Investasi adalah jumlah modal yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun yang berasal dari investor swasta.
- Upah adalah tingkat upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah Sumatera Barat.

### 3.4 Uji Statistik

Untuk mengetahui kebenaran hipotesa, maka perlu uji statistik berupa Koefisien Determinasi  $R^2$  (*Goodness Of Fit*), uji F, dan uji t.

### c. Uji t-test Statistik

Uji t adalah pengujian koefisien regresi secara individual dan untuk mengetahui dari masing-masing variabel dalam mempengaruhi variabel dependen, dengan menganggap variabel lain konstan atau tetap Langkah-langkah pengujiannya sebagai berikut :

- $H_0 : \beta_i = 0$ , artinya variabel independen secara individu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
- $H_a : \beta_i \neq 0$ , artinya variabel independen secara individu berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- Nilai t-tabel dapat dicari dengan degrees of freedom :

$$t\text{-tabel} = t_{\alpha : n-k}$$

Dimana :

$\alpha$  = Derajat signifikan

$n$  = Jumlah sampel (observasi)

$k$  = Banyaknya parameter/koefisien regresi plus konstanta

- t-hitung dapat dicari dengan rumus : (Nachrowi, 2006)

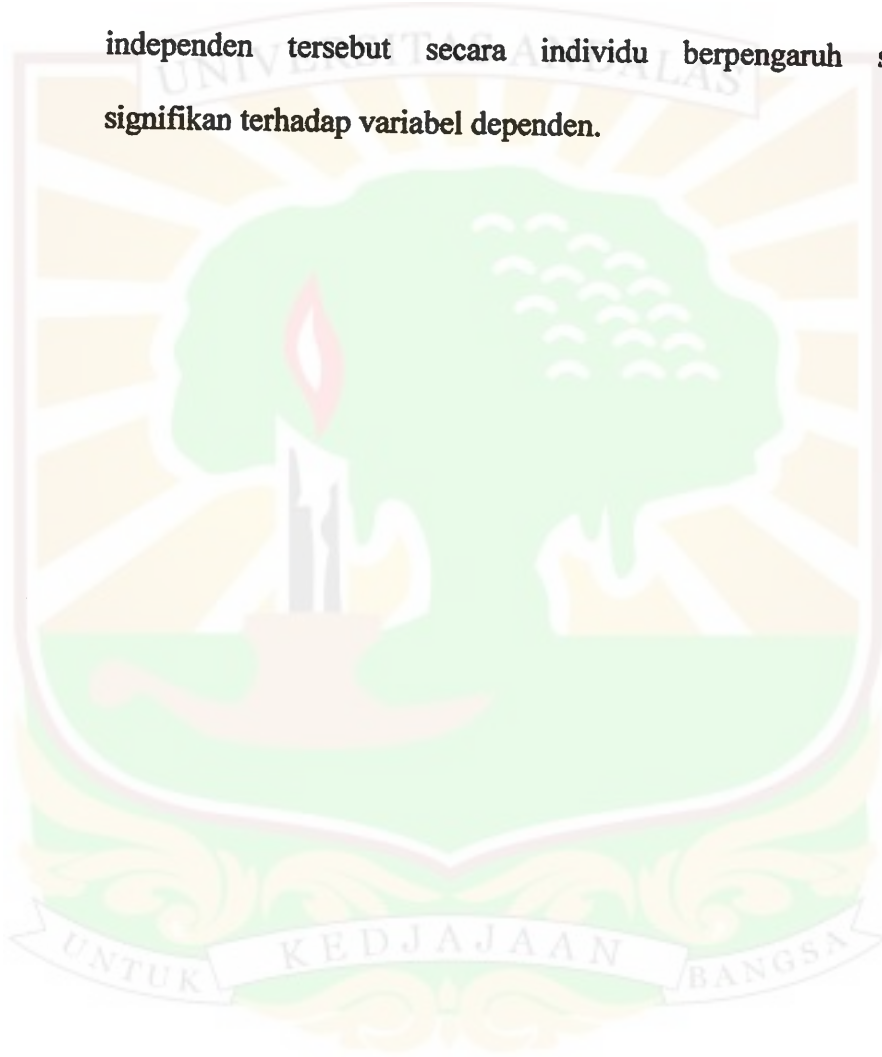
$$t = \frac{\beta_i}{Se(\beta_i)}$$

Dimana :

$\beta_i$  = Koefisien Regresi

$Se(\beta_i)$  = Standar Error Koefisien Regresi

- Kriteria pengujian :
  - Jika  $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ , maka  $H_0$  diterima Berarti variabel independen tersebut secara individu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
  - Jika  $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak Berarti variabel independen tersebut secara individu berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.



## **BAB IV**

### **TINJAUAN UMUM**

#### **4.1 Keadaan Geografis**

Provinsi Sumatera Barat terletak di sebelah barat Pulau Sumatera, dan mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Provinsi Sumatera Utara

Sebelah Selatan : Provinsi Bengkulu

Sebelah Barat : Samudera Hindia

Sebelah Timur : Provinsi Riau dan Jambi

Secara geografis Propinsi Sumatera Barat terletak antara  $0^{\circ}54'$  lintang utara dan  $3^{\circ}3'$  lintang selatan serta  $98^{\circ}36'$  dan  $101^{\circ}53'$  bujur timur, dengan luas daerah sekitar 42,2 ribu  $\text{km}^2$ , dan luas tersebut setara dengan 2,27 % dari luas negara Republik Indonesia. Sementara luas perairan lautnya diperkirakan 186.500  $\text{km}^2$  dengan panjang garis pantainya 2.420.357 km, ini berarti Propinsi Sumatera Barat kaya akan sumber daya alam darat dan laut. Terdapat enam kabupaten dan kota yang langsung berbatasan dengan pantai yaitu kabupaten Pasaman Barat, Agam, Pesisir Selatan, Kepulauan Mentawai, Padang Pariaman, Kota Pariaman dan Padang. Dengan garis pantai sepanjang itu Sumatera Barat mempunyai potensi perikanan dan kelautan sangat besar tapi produksi ikan lautnya masih 35% yang tereksploitasi.

Sebagian daerah Sumatera Barat memiliki topografi pegunungan. Kondisi alamnya masih diliputi oleh kawasan lindung yang mencapai sekitar 44,5% dari luas keseluruhan lahan. Sementara areal yang sudah dimanfaatkan untuk



budidaya baru tercatat sebesar 23.472,6 km<sup>2</sup> atau sekitar 55% dari kawasan keseluruhannya. Besarnya areal kawasan hutan lindung menunjukkan bahwa Sumbar menjadi salah satu daerah tangkapan hujan atau biasa disebut *water catchment* bagi daerah sekitarnya. Disamping sebagai paru-paru dunia, propinsi Sumatera Barat merupakan salah satu propinsi di Indonesia yang kaya dengan sumber keanekaragaman hayatinya.

#### **4.2 Perkembangan Perekonomian di Sumatera Barat**

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu cara untuk menerangkan atau mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian yang dilihat dari laju pertumbuhan Produk Domesti Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi mempunyai arti penting bagi pelaku ekonomi dalam mengambil kebijakan yang akan mereka. Salah satu indikator untuk menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut adalah PDRB. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Produk Domestik Regional Bruto bila dibagi dengan jumlah penduduk akan menggambarkan nilai PDRB perkapita atau tingkat kemakmuran penduduk suatu wilayah. PDRB perkapita merupakan nilai seluruh produk dan jasa yang dihasilkan di sebuah negara dalam suatu tahun, dibagi dengan rata-rata jumlah penduduk dalam tahun yang sama (BPS)

Walaupun terjadi penurunan laju pertumbuhan perekonomian secara nasional yang sangat drastis pada tahun 1998 yaitu sebesar -13,13 persen dan

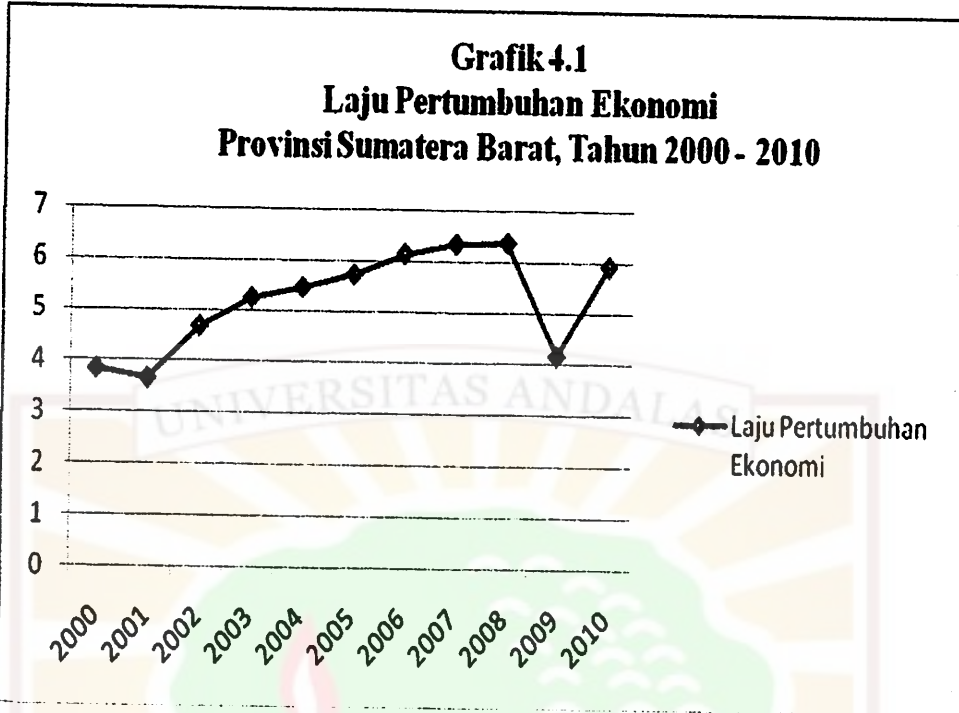
perekonomian daerah Sumatera Barat juga ikut mengalami penurunan sebesar - 6,78 persen yang disebabkan oleh krisis moneter yang kemudian berlanjut menjadi krisis ekonomi yang bermula pada pertengahan tahun 1997. Namun secara keseluruhan perkembangan perekonomian di Sumatera Barat mengalami peningkatan dari tahun 2000 sampai 2010

Krisis moneter yang melanda kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara pada tahun 1997 telah berkembang menjadi krisis ekonomi yang sangat mempengaruhi pelaksanaan pembangunan disegala bidang. Nilai tukar rupiah terhadap mata uang dunia sangat merosot yang mengakibatkan kenaikan harga barang yang sangat tajam sehingga sangat membebani masyarakat.

**Table 4.1**  
**Jumlah dan Laju Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan 2000**  
**Provinsi Sumatera Barat 2000-2010**

<b>Tahun</b>	<b>PDRB (Juta Rupiah)</b>	<b>Laju Pertumbuhan (%)</b>	<b>Pendapatan Perkapita (Konstan 2000)</b>
2000	22.889.614,050	3,84	5.416.274,15
2001	23.727.373,920	3,66	5.591.449,99
2002	24.840.187,750	4,69	5.790.730,04
2003	26.146.781,640	5,26	5.866.695,33
2004	27.578.136,550	5,47	6.070.879,68
2005	29.159.480,530	5,73	6.393.820,89
2006	30.949.945,110	6,14	6.681.547,82
2007	32.912.968,600	6,34	7.006.092,39
2008	35.007.921,570	6,37	7.349.820,28
2009	36.464.583,000	4,16	7.552.772,77
2010	36.683.274,000	5,93	7.569.807,91

**Sumber : Data diolah dari Sumatera Barat Dalam Angka berbagai tahun**



Krisis ekonomi yang terjadi pertengahan 1997 juga berakibat buruk pada pertumbuhan ekonomi daerah Sumatera Barat tahun 2000 yaitu hanya sebesar 3,84 persen dengan pendapatan perkapita sebesar Rp. 5,42 juta. Hal ini menyebabkan terdepresiasinya nilai tukar Rupiah yang langsung berdampak pada menurunnya nilai tambah sektor industri pengolahan sektor bangunan dan konstruksi serta sektor ekonomi secara keseluruhan di Indonesia.

Hal ini menyebabkan banyaknya perusahaan yang mengalami kebangkrutan karena biaya produksi yang mengalami peningkatan yang cukup drastis sehingga perusahaan-perusahaan tersebut tidak sanggup menanggungnya, dan dampaknya perusahaan terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja sehingga menyebabkan semakin banyaknya pengangguran. Selain dari krisis

ekonomi, Indonesia juga mengalami ketidakstabilan politik dan keamanan yang berpuncak pada runtuhnya orde baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto

Pada tahun 2002 pertumbuhan ekonomi daerah Sumatera Barat mulai menunjukkan perkembangan yang positif dengan terjadinya peningkatan pertumbuhan sebesar 0,85 persen dan pendapatan perkapita sebesar Rp. 5,79 juta. Keadaan ini terus membaik sampai tahun 2008 pertumbuhan ekonomi terus meningkat sehingga menjadi 6,37 persen dengan pendapatan perkapita sebesar Rp. 7.35 juta seiring dengan perbaikan ekonomi secara nasional. Di tahun 2009 pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat sempat mengalami penurunan menjadi 4,16%, dan kembali naik menjadi 5,93% dengan pendapatan perkapita sebesar Rp. 7,57 juta pada tahun 2010.

### **4.3 Ketenagakerjaan**

Masalah kependudukan merupakan salah satu masalah yang perlu mendapat perhatian yang serius dalam proses pembangunan karena masalah ini juga mencakup jumlah, komposisi, distribusi dan pendapatan penduduk. Konsep tentang Penduduk Usia Kerja yang berlaku di Indonesia diartikan sebagai penduduk yang berumur 15 tahun keatas.



**Tabel 4.2**  
**Penduduk Usia Kerja (jiwa)**  
**Provinsi Sumatera Barat, 2000-2010**

<b>Tahun</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Total</b>
2000	1.605.263	1.716.544	3.321.767
2001	1.597.157	1.704.963	3.302.120
2002	1.652.654	1.754.612	3.407.266
2003	1.684.543	1.796.842	3.481.385
2004	1.461.150	1.599.986	3.061.136
2005	1.497.423	1.593.017	3.090.440
2006	1.523.090	1.644.502	3.167.541
2007	1.577.400	1.678.700	3.256.100
2008	1.610.300	1.706.700	3.317.000
2009	1.643.832	1.739.625	3.383.457
2010	1.609.095	1.697.169	3.306.264

Sumber : BPS Sumbar tahun 2000-2010

Dari tahun 2000, PUK terus meningkat dan kembali turun pada tahun 2004 menjadi 3,06 juta jiwa. Peningkatan jumlah PUK terus berlangsung sampai tahun 2008 yaitu sebesar 3,38 juta jiwa. Namun turun kembali menjadi 3,31 juta pada tahun 2010.

Bagian dari tenaga kerja aktif dalam kegiatan ekonomi disebut angkatan kerja. Angkatan kerja akan meningkat seiring dengan adanya peningkatan PUK. Angkatan kerja yang terus bertambah tanpa adanya perluasan lapangan kerja dapat menyebabkan pengangguran. Sedangkan bagian dari tenaga kerja tidak aktif disebut dengan bukan angkatan kerja.

**Tabel 4.3**  
**Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Kegiatan Utama**  
**Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2000-2010**

<b>Tahun</b>	<b>Angkatan Kerja</b>	<b>Bukan Angkatan Kerja</b>
2000	1.707.720	1.614.047
2001	1.769.276	1.532.844
2002	1.818.458	1.588.808
2003	1.980.908	1.500.477
2004	1.916.883	1.144.253
2005	1.932.452	1.157.988
2006	2.055.734	1.111.807
2007	2.126.559	1.129.541
2008	2.122.217	1.194.783
2009	2.172.002	1.211.455
2010	2.194.040	1.112.224

**Sumber : BPS Sumbar 2000-2010**

Dapat dilihat bahwa penduduk bukan angkatan kerja mengalami kenaikan secara keseluruhan. Penduduk bukan angkatan kerja ini memilih untuk tidak bekerja dengan berbagai alasan masing-masing. BPS membagi bukan angkatan kerja menjadi tiga bagian:

a. Sekolah

Merupakan kegiatan seseorang untuk bersekolah formal, mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi sebelum seminggu pencacahan.

b. Mengurus Rumah Tangga

Merupakan kegiatan seseorang mengurus rumah tangga tanpa mendapatkan upah, misalkan ibu-ibu rumah tangga dan anak-anaknya yang membantu mengurus rumah tangga. Sebaliknya pembantu rumah

tangga yang mendapatkan upah, walaupun pekerjaannya mengurus rumah tangga dianggap bekerja.

c. Kegiatan Lainnya

Kegiatan seseorang selain yang disebutkan diatas, yakni mereka yang sudah pensiun, orang-orang cacat jasmani (buta, bisu, dsb).

Struktur penduduk usia kerja Sumbar juga secara keseluruhan meningkat bagi angkatan kerja maupun bukan angkatan kerja. Peningkatan pada angkatan kerja disebabkan oleh setiap orang butuh pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan sebagai alat memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun seiring dengan penurunan jumlah penduduk pada tahun 2000, jumlah angkatan kerja ikut menurun menjadi 1,7 juta jiwa dibanding dari tahun sebelumnya tahun 1999 sebesar 2,02 juta jiwa.

Jumlah angkatan kerja ini terdiri dari yang bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan. Angkatan kerja yang bekerja adalah penduduk yang melakukan kegiatan ekonomi dengan maksud untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam satu minggu yang lalu. Angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan yaitu seseorang yang kegiatannya sedang mencari pekerjaan (BPS).

**Tabel 4.4**  
**Perkembangan Angkatan Kerja, Kesempatan Kerja dan Pengangguran**  
**Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2000-2010 ( Jiwa )**

<b>Tahun</b>	<b>Angkatan Kerja</b>	<b>Kesempatan Kerja</b>	<b>Pengangguran</b>	<b>Index Pertumbuhan Pengangguran (%)</b>
2000	1.707.720	1.648.925	58.795	100.00
2001	1.769.276	1.703.564	65.712	111.76
2002	1.818.458	1.708.403	110.055	178.24
2003	1.980.908	1.725.374	255.534	310.43
2004	1.916.883	1.672.605	244.278	306.03
2005	1.932.452	1.710.249	222.203	296.99
2006	2.055.734	1.811.517	244.217	306.02
2007	2.126.559	1.907.098	219.461	295.88
2008	2.122.217	1.951.391	170.826	273.72
2009	2.172.002	1.998.922	173.080	275.04
2010	2.194.040	2.041.454	152.586	263.20

*Sumber : BPS Sumbar 2000-2010*

Dari table 4.4 ditahun 2000 angkatan kerja berjumlah 1.707.720 jiwa yang terdiri dari bekerja 1.752.508 jiwa dan pengangguran sebesar 58.795 jiwa. Kenaikan pengangguran ini dikarenakan pada akhir tahun 1997 awal terjadinya krisis ekonomi yang menyebabkan inflasi tinggi karena nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terutama dolar mengalami penurunan yang sangat tajam, sehingga banyak perusahaan yang mem-PHKkan karyawannya/tenaga kerjanya karena besarnya biaya operasional perusahaan sehingga untuk mengurangi biaya, banyak perusahaan melakukan perampingan tenaga kerja agar perusahaan tetap dapat berproduksi.





Selama periode 2000-2011 angkatan kerja dan yang bekerja terus mengalami peningkatan sedangkan jumlah pengangguran memperlihatkan trend yang berfluktuasi setiap tahunnya, yaitu pada periode 2000-2010 mengalami peningkatan. Pada tahun 2000 pengangguran mengalami penurunan yang kemudian naik hingga tahun 2003 dengan index sebesar 310.43 persen. Hal ini mungkin disebabkan karena proporsi pertumbuhan angkatan kerja lebih besar daripada proporsi kesempatan kerja. Pada tahun 2004 pengangguran menurun sampai tahun 2005 menjadi sebesar 222.203 jiwa dengan index 296.99 persen. Dan pada tahun 2006 kembali meningkat menjadi 306.02 persen, yang pada tahun selanjutnya hingga tahun 2008 kembali mengalami penurunan menjadi menjadi 273.72 persen. Namun di tahun 2009 index pengangguran naik kembali menjadi 275.04 persen, dan kembali turun menjadi 263,20 persen pada tahun 2010.

Walaupun kesempatan kerja yang digambarkan melalui jumlah angkatan kerja yang bekerja meningkat, pengangguran juga meningkat karena penambahan kesempatan kerja lebih sedikit dari penambahan angkatan kerja. Rendahnya tingkat pengangguran pada tahun 2000 dibandingkan dengan keadaan tahun 2003 diduga disebabkan pada waktu itu penduduk memperebutkan pekerjaan belum sebanyak seperti empat tahun berikutnya. Sementara terjadinya peningkatan dalam beberapa tahun terakhir ini selain terjadi krisis ekonomi yang berkepanjangan yang mempunyai dampak yang sangat kompleks, terutama dibidang sosial dan ekonomi. Nilai tukar rupiah anjlok, perbankan terpuruk, investasi terhambat dan sektor riil tidak mampu bertahan yang akhirnya terjadi pemutusan hubungan kerja, khususnya industri yang banyak menggunakan bahan baku impor. Akibatnya jumlah pencari kerja cenderung semakin meningkat. Tidak

dapat dipungkiri bahwa krisis ekonomi dan moneter telah berimbas pada pembangunan ketenagakerjaan di provinsi Sumatera Barat.

#### **4.4 Pertumbuhan Penduduk di Sumatera Barat**

Penduduk merupakan unsur penting dalam kegiatan ekonomi dan dalam usaha untuk membangun suatu perekonomian. Dalam usaha untuk meningkatkan produksi dan pengembangan kegiatan ekonomi, penduduk memegang peranan penting karena ia menyediakan tenaga kerja, tenaga ahli, pimpinan perusahaan dan tenaga usaha. Pertambahan penduduk umumnya diukur dengan laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk merupakan suatu ukuran yang menunjukkan berapa besar persentase pertumbuhan penduduk itu setiap tahunnya.

Pertumbuhan penduduk merupakan hasil perubahan komponen demografi yaitu kelahiran, kematian dan migrasi. Kelahiran mempunyai dampak menambah jumlah penduduk pada usia muda, sedang kematian mengurangi jumlah penduduk, tergantung mana jumlahnya yang lebih besar.

Pertumbuhan penduduk dapat mempengaruhi pembangunan serta pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pembangunan ekonomi tidak sama dengan pertumbuhan ekonomi. Hubungan pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan ekonomi memiliki tiga kemungkinan yaitu menghambat, menunjang, dan tidak ada hubungan. Salah satu faktor yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara adalah penduduk. Penduduk merupakan tenaga potensial untuk melaksanakan pembangunan jika digunakan secara maksimal dan optimal.

Sebaliknya penduduk juga dapat menjadi beban suatu negara karena menghambat pembangunan ekonomi.

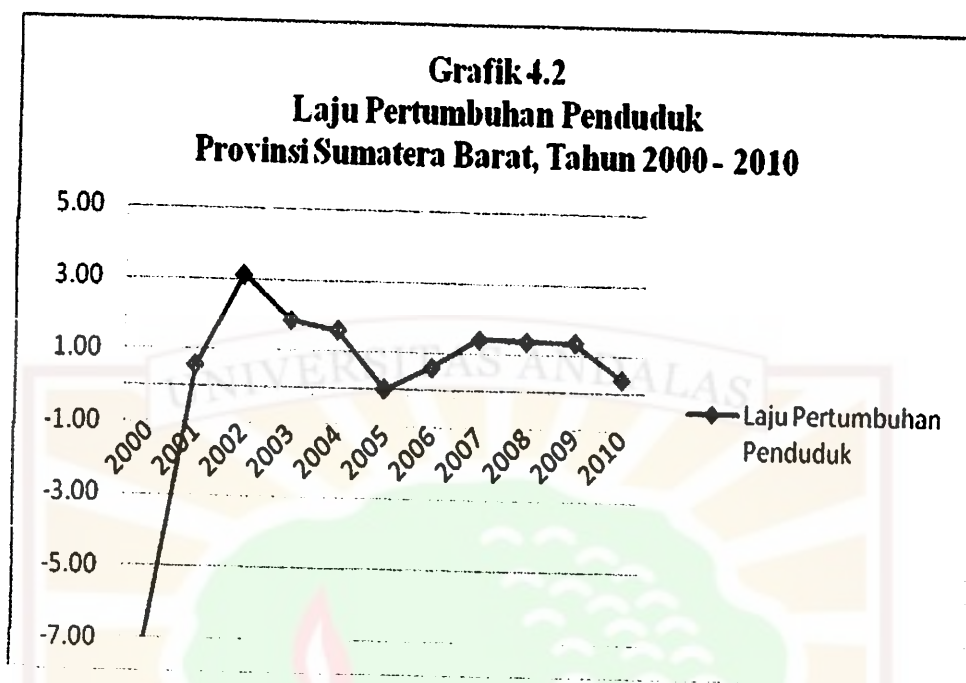
Penduduk menjadi penghambat pembangunan ekonomi apabila tingkat pengangguran tinggi dan komposisi penduduk diluar usia kerja lebih besar. Pengangguran yang tinggi salah satu penyebabnya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia dari angkatan kerja penduduk daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan sensus tahun 2000 jumlah penduduk provinsi Sumatera Barat berjumlah 4.220.320 jiwa dan menurut sensus tahun 2010 sebesar 4.845.998 jiwa dimana terjadi penambahan penduduk sebesar 625.678 jiwa. Dengan demikian dalam periode waktu antara tahun 2000-2010 penduduk Sumbar mengalami peningkatan 14,82 persen.

**Tabel 4.5**  
**Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk**  
**Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2000-2010**

<b>Tahun</b>	<b>Laki-laki (orang)</b>	<b>Perempuan (orang)</b>	<b>Total (orang)</b>	<b>Laju Pertumbuhan (%)</b>
2000	2.070.600	2.149.720	4.220.320	-7,08
2001	2.082.020	2.161.500	4.375.080	0,55
2002	2.147.170	2.227.910	4.243.510	3,10
2003	2.187.200	2.269.700	4.456.800	1,87
2004	2.225.874	2.302.395	4.528.242	1,60
2005	2.256.969	2.346.988	4.603.957	1,67
2006	2.285.482	2.346.670	4.632.152	0,61
2007	2.311.652	2.386.112	4.697.764	1,42
2008	2.346.299	2.416.800	4.763.099	1,39
2009	2.367.599	2.460.374	4.827.973	1,36
2010	2.404.472	2.441.526	4.845.998	0,37

*Sumber : BPS. 2000 - 2010*



Dari data diatas pada tahun 2000-2010 diketahui bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Jika dilihat perkembangan dari tahun 2000-2010 jumlah penduduk perempuan meningkat sebanyak 291.806 jiwa. Jumlah ini lebih sedikit dari peningkatan penduduk laki-laki yaitu sebesar 333.872 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk setiap tahun antara tahun 2000-2010 berkisar antara 1-2 persen per tahunnya . kemudian terjadi penurunan jumlah penduduk menjadi 4.220.320 jiwa tahun 2000 yang jika dihitung maka mengalami penurunan hingga 7.08 persen. Hal ini disebabkan adanya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan penduduk yang terlihat dengan suksesnya program keluarga berencana pada tahun tersebut. Pada tahun berikutnya yaitu 2001 sampai tahun 2010 jumlah penduduk terus meningkat menjadi 4.845.998 jiwa.



#### 4.5 Investasi

Investasi atau penanaman modal merupakan langkah awal dari kegiatan produksi dan kegiatan awal pembangunan. Penanaman modal dapat mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi. Investasi tidak hanya dilakukan oleh masyarakat ataupun pihak swasta tetapi juga dari pemerintah.

**Tabel 4.6**  
**Nilai Investasi Pemerintah Atas Dasar Harga Konstan 2000**  
**dan Realisasi PMDN / PMA**  
**Provinsi Sumatera Barat. Tahun 2000-2010**

Tahun	Investasi pemerintah (Rp. Milyar)	PMDN (Rp. 000)	PMA (Rp. 000)	Investasi Swasta =PMDN+PMA (Rp. 000)
2000	4.686,00	187.773.150	514.892.424	702.665.574
2001	4.736,14	183.976.140	1.104.420.486	1.288.396.626
2002	4.785,54	348.234.000	1.097.790.038	1.446.024.038
2003	4.934,28	204.464.890	251.442.857	455.9077.47
2004	5.091,19	631.733.330	265.350.770	897.084.100
2005	5.388,13	607.061.000	830.447.145	1.437.508.145
2006	5.604,65	234.856.820	804.298.040	1.039.154.860
2007	5.824,27	58.511.100	64.137.435	122.648.535
2008	6.112,93	608.917.890	199.374.009	808.291.899
2009	6.344,16	761.617.900	216.238.818	977.856.718
2010	6.567,29	404.650.270	158.847.003	563.497.273

*Sumber : BPS, BKPMd dan Bank Indonesia*

Nilai investasi Sumbar juga mengalami fluktuasi baik investasi pemerintah maupun investasi swasta sesuai dengan keadaan perekonomian. Investasi pemerintah pada tahun 2010 mencapai Rp 6.567,29 milyar yang berarti mengalami kenaikan sebesar 40.15 persen dibanding tahun 2000. Begitu juga

dengan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang mengalami kenaikan menjadi Rp 404,65 milyar pada tahun 2010. Penanaman Modal Asing (PMA) pada tahun 2000 sebesar Rp 514,89 milyar dan pada tahun 2010 PMA mencapai Rp 158,85 milyar.

Banyak faktor yang menyebabkan investasi mengalami pasang surut. diantara penyebabnya yaitu situasi perekonomian di Indonesia yang belum stabil setelah krisis perekonomian pertengahan tahun 1997. Selain itu situasi keamanan di berbagai daerah di Indonesia belum bisa dikatakan aman. sehingga para investor ragu untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Begitu juga pengurusan izin usaha di Indonesia yang sangat sulit dan lama. dimana berdasarkan penelitian World Bank dan Bank Pembangunan Asia. Indonesia menduduki posisi 135 dari 175 negara dalam kemudahan mengurus izin usaha. Hal ini harus menjadi perbincangan penting di pemerintahan agar dapat dibentuk kebijaksanaan untuk memperbaikinya.

#### **4.6 Upah Minimum Regional**

Kondisi di pasar kerja selalu terkait dengan kebijakan upah minimum dan peranan tripartit Dewan Pengupahan. Tripartit Dewan Pengupahan dapat membuat keputusan bersama tentang tingkat upah antara serikat pekerja dengan pihak pemberi kerja. Dalam hubungan tersebut pemerintah memiliki peranan penting untuk menetapkan upah minimum yang mengikat bagi para pemberi kerja di satu pihak dan pekerja pada pihak lain.

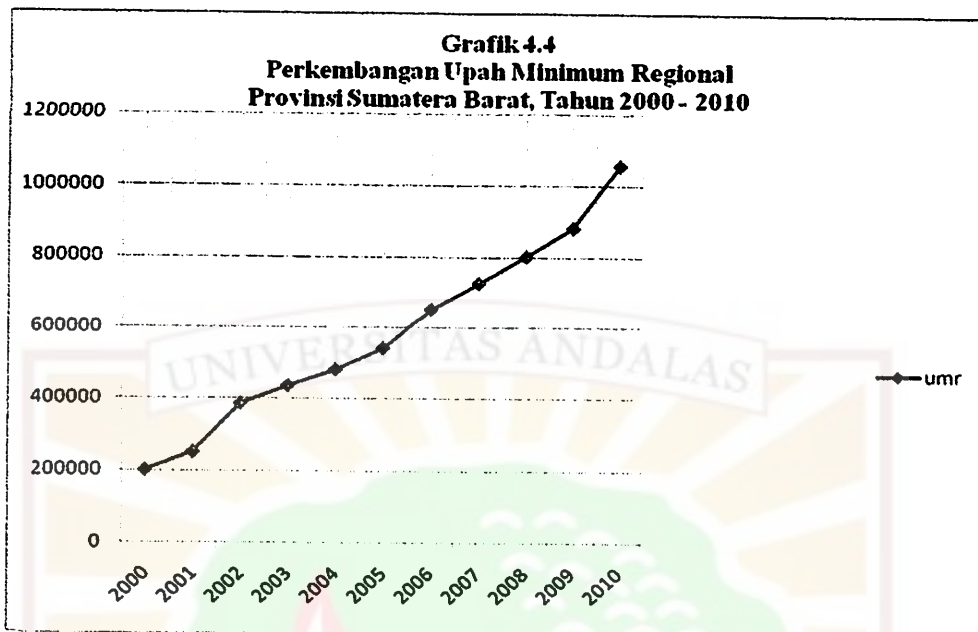
Upah minimum adalah upah permulaan yang diterima oleh pekerja atau buruh yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Upah permulaan adalah upah terendah yang harus diterima oleh pekerja pada waktu pertama kali dia diterima bekerja. Jika upah meningkat maka pekerja dapat meningkatkan nafkah bagi keluarganya. Upah Minimum Regional (UMR) banyak dinikmati oleh para pekerja pemula dan tidak terampil sehingga upah yang mereka terima tidak terlalu rendah.

Dari tabel 4.9 terlihat bahwa UMR terus meningkat. Pada tahun 2000 UMR hanya sebesar Rp 200.000 per bulan. namun pada tahun 2010 telah mencapai Rp 1.055.000 per bulan. Peningkatan UMR yang ditetapkan pemerintah ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja. Antara tahun 2000-2010 UMR di Sumbar tidak pernah mengalami penurunan.

**Tabel 4.7**  
**Perkembangan Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat.**  
**Tahun 2000-2010**

<b>Tahun</b>	<b>Nilai UMR (Rupiah per bulan)</b>	<b>Index Perkembangan UMR (%)</b>
2000	200.000	100.00
2001	250.000	125.00
2002	385.000	179.00
2003	435.000	191.99
2004	480.000	202.33
2005	540.000	214.83
2006	650.000	235.20
2007	725.000	246.74
2008	800.000	257.08
2009	880.000	267.08
2010	1.055.000	286.97

**Sumber : Depnakertran**

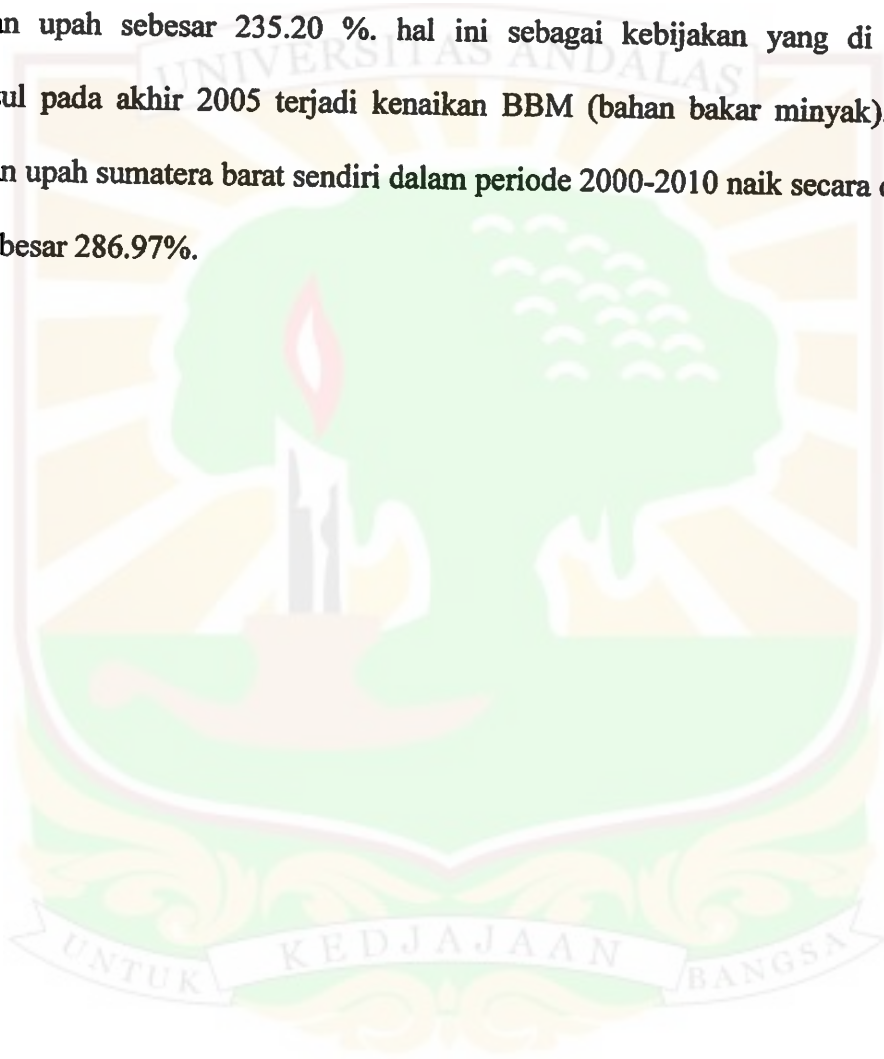


Sumber : Depnakertrans (data diolah)

Dari grafik di atas kita bisa menyimpulkan bahwa setiap tahun yaitu dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2010, upah minimum selalu mengalami kenaikan. Hal ini dilakukan oleh pemerintah provinsi terkait untuk menyesuaikan laju inflasi yang mengakibatkan kenaikan harga-harga terhadap pendapatan tenaga kerja. Pada tahun 2000 upah minimum hanya sebesar Rp. 200.000 dengan index 100 persen, yang harus diterapkan dalam sistem pengupahan oleh pemberi kerja kepada pekerjanya. hingga pada tahun 2010 upah minimum adalah Rp. 1.055.000. Pertumbuhan peningkatan kenaikan upah minimum di Sumatera barat terjadi pada tahun 2002, yaitu sebesar 179 persen. Ini lebih besar dari tahun sebelumnya yaitu pada 2001 yang hanya 125 persen. Hal ini terjadi karena penyesuaian atas dampak krisis ekonomi yang terjadi pada akhir 1998, mengingat pada masa krisis ekonomi daya beli masyarakat rendah karena dorongan inflasi yang tinggi, sehingga menuntut kebutuhan hidup minimum yang



lebih besar. Pada tahun 2000 sampai dengan 2002 terjadi pertumbuhan tingkat upah minimum yang cukup tinggi dimana tahun 2002 merupakan pertumbuhan yang paling tinggi yaitu sebesar 179 %. hal ini bisa menjadi gambaran bahwa masih tinggi nya tingkat inflasi pada masa itu. Berikut pada tahun 2006 terjadi kenaikan upah sebesar 235.20 %. hal ini sebagai kebijakan yang di ambil menyusul pada akhir 2005 terjadi kenaikan BBM (bahan bakar minyak). Laju kenaikan upah sumatera barat sendiri dalam periode 2000-2010 naik secara drastis yaitu sebesar 286.97%.



## BAB V

### PENEMUAN EMPIRIS DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

#### 5.1 Penemuan Empiris

Perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran di Sumatera Barat ini menggunakan data time series selama 11 tahun atau dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2010. Dengan menggunakan program SPSS 16 (*Statistical Program for Social Science*) dan metode *Ordinary Least Square* (OLS) dilakukan analisa untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat atau pengangguran.

Variabel terikat (*dependent variable*) pada pembahasan ini adalah pengangguran (P). Variabel-variabel bebas (*independent variables*) yang mempengaruhi adalah Pertumbuhan Ekonomi ( $Y_D$ ), pertumbuhan penduduk ( $J_P$ ), investasi swasta ( $I_s$ ), dan upah minimum regional (w). Dari perhitungan variabel-variabel tersebut diperoleh hasil persamaan regresinya sebagai berikut:

**Tabel 5.1**  
**Hasil Regresi Pengangguran dalam bentuk Logaritma**

Dependent Variable	Konstanta	Independent Variable				R <sup>2</sup>	F
		Y <sub>D</sub>	J <sub>P</sub>	Log I <sub>s</sub>	Log w		
Log P	10.577	0.466	0.031	0.002	-1.390	0.915	16.148
T-Hitung	4.704	7.136	1.531	0.014	-4.806		
T-Tabel	1.796	1.796	1.796	1.796	1.796		

*Sumber : Data diolah Menggunakan Aplikasi SPSS*

Dengan menghubungkan pengangguran dengan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, investasi swasta, dan upah minimum regional, berdasarkan pada nilai koefisien determinasi serta hasil pengujian terhadap t-test dan F-test, maka diperoleh persamaan sebagai berikut;

$$\text{Log P} = 10.577 + 0.466 Y_D + 0.031 J_P + 0.002 \text{Log } I_S - 1.390 \log w$$

(7.136)
(1.531)
(0.014)
(-4.806)

$$R^2 = 0.915$$

$$F \text{ statistik} = 16.148$$

Angka dalam kurung adalah nilai **t-hitung**.

Dari bentuk persamaan diatas diperoleh kesimpulan bahwa hasil pengujian empiris menunjukkan pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, investasi Swasta dan upah minimum regional terhadap pengangguran. Dimana pertumbuhan ekonomi dan upah minimum regional mempunyai pengaruh positif terhadap pengangguran di Sumbar. Sedangkan pertumbuhan penduduk dan investasi swasta mempunyai pengaruh negatif terhadap pengangguran di Sumatera Barat.

Hubungan yang dihasilkan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, investasi swasta dan UMR memberikan variasi yang sangat berarti dimana  $R^2$  adalah sebesar 0.915. Angka tersebut menunjukkan bahwa variabel bebas pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, investasi swasta dan UMR dapat menerangkan bahwa variasi perubahan dari jumlah pengangguran sebesar 91.5 persen. Dengan demikian 8.5 persen variasi pengangguran di Sumbar dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model.

Uji F dilakukan untuk menentukan apakah secara bersama-sama *independent variable* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *dependent variable*. Pengujian dilakukan dengan membandingkan F-hitung dengan F-tabel pada derajat kepercayaan 95 persen. Disini nilai F-hitung sebesar 16.148 sedangkan nilai F-tabel sebesar 4.53. Maka F-hitung lebih besar dari F-tabel dan ini berarti bahwa variabel bebas secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang berarti terhadap pengangguran di Sumatera Barat.

Berdasarkan persamaan diatas dapat diketahui bahwa variabel pertumbuhan ekonomi memiliki nilai koefisien sebesar 0.466 dengan t-hitung sebesar 7.136. Nilai t-hitung yang lebih besar dari t-tabel yaitu sebesar 1.796 yang berarti pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang signifikan terhadap pengangguran di Sumbar. Dengan nilai sig. sebesar 0.000 persen, menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang signifikan terhadap penambahan pengangguran di Sumbar pada derajat kepercayaan hampir 100 persen. Jika pertumbuhan ekonomi meningkat 1 % maka akan menambah pengangguran sebesar 0.466 persen. Sebaliknya jika terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi maka akan mengurangi pengangguran sebesar 0.466 persen..

Variabel pertumbuhan penduduk memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0.031 dan t-hitung sebesar 1.531. Nilai t-hitung yang lebih kecil dari t-tabel ( $1.531 < 1.796$ ), berarti pengaruhnya tidak signifikan terhadap pengangguran. Hal ini mungkin saja terjadi karena proporsi angkatan kerja di sumbar lebih besar dari ketersediaan lapangan kerja yang ada, atau bisa jadi kualitas dari angkatan kerja



sumbar tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Syofiardi (1999), yang mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang cepat dapat menghambat pertumbuhan atau sebaliknya bisa jadi merupakan pemicu pertumbuhan ekonomi. Namun pada akhirnya persoalan penduduk merupakan beban atau modal pembangunan ekonomi bukan semata-mata terletak pada besar kecil jumlahnya. Akan tetapi, juga tergantung pada kualitas dan kapasitas penduduk itu sendiri (Sofyardi, 1999), hal ini berarti penduduk di Sumatera Barat menjadi beban bagi pembangunan.

Variabel investasi swasta memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0.002 dan t-hitung sebesar 0.014. Nilai t-hitung yang lebih kecil dari t-tabel ini ( $0.014 < 1.796$ ) menunjukkan pengaruh investasi swasta tidak signifikan terhadap pengangguran di Sumatera Barat. Pengaruh negatif ini tidak hanya ditemukan pada penemuan empiris ini, tetapi hal ini juga terjadi di wilayah Swedia. Menurut penelitian Magnus Blomström and Ari Kokko (Blomstrom. dkk. 2000), investasi asing menurunkan kesempatan kerja bagi penduduk negara Swedia pada pertengahan 1990an. Hal ini disebabkan oleh investasi asing yang ada di negara tersebut turut mendatangkan tenaga kerja asing. Akibatnya kesempatan kerja bagi tenaga kerja domestik tidak bertambah. sehingga angka pengangguran pun tidak dapat diturunkan. Hal ini mungkin juga menjadi alasan hubungan negatif antara investasi swasta dengan pengangguran di Sumbar. Kemungkinan lainnya. tingkat investasi swasta di Sumatera Barat yang proporsinya tidak cukup besar.

Variabel Upah Minimum Regional (UMR) memiliki nilai koefisien regresi sebesar -1.390 persen yang menunjukkan hubungan yang positif dengan

pengangguran. Hubungan ini signifikan dengan tingkat kepercayaan 99.7 persen yang berarti setiap kenaikan UMR sebesar 1% maka akan mengurangi pengangguran sebesar 1.390 persen. Sebaliknya jika terjadinya penurunan UMR maka akan meningkatkan pengangguran sebesar 1.390 persen dengan asumsi *ceteris paribus*.

## **5.2 Implikasi Kebijakan**

Dari hasil penemuan empiris yang telah dijelaskan sebelumnya menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh yang signifikan dari variabel pertumbuhan penduduk dan investasi swasta terhadap pengangguran di Sumatera Barat. Sedangkan terdapat pengaruh yang positif dari pertumbuhan ekonomi dan UMR terhadap pengangguran di sumbar.

Maka implikasi kebijakan dari masing-masing factor, akan dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Implikasi Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang positif terhadap pengangguran. Diduga pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh nyata terhadap penyerapan tenaga kerja di Sumatera Barat karena rata-rata angkatan kerja di Sumatera Barat mayoritas adalah pekerja non formal dimana sebagian besar terdapat pada sektor pertanian. Namun, walaupun demikian Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (khususnya Sumatera Barat) masih berada pada tahap pemulihan (*recovery*) dimana terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi

meskipun tidak secepat yang diinginkan, sehingga tidak seimbangnya antara proporsi pertumbuhan ekonomi dengan proporsi pertumbuhan penduduk.

## **2. Implikasi Kebijakan Pertumbuhan Penduduk**

Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Sumatera Barat memberikan kontribusi yang negatif bagi pengangguran. Hal ini berarti pertumbuhan penduduk daerah Sumbar merupakan beban bagi pembangunan ekonomi. Tentu saja tidak sembarang penduduk akan berpengaruh negatif terhadap pembangunan ekonomi, hal ini tergantung pada kualitas dan kapasitas penduduk itu sendiri (Sofyardi, 1999). Oleh karena itu, pemerintah harus mendukung setiap kegiatan peningkatan mutu dan kesejahteraan penduduk, supaya penduduk tersebut mampu bersaing di pasar kerja atau mampu menciptakan lapangan kerja sendiri.

Pertambahan jumlah penduduk pada setiap tahunnya selain bertambahnya tingkat kelahiran disebabkan juga oleh adanya mobilitas penduduk. Datangnya penduduk-penduduk baru yang berasal dari luar daerah semakin menambah jumlah pencari kerja di Sumatera Barat. Apabila peningkatan pencari kerja ini tidak terserap dengan cepat dipasar tenaga kerja maka mereka akan menambah jumlah pengangguran lagi. Pemerintah seharusnya melakukan pengendalian jumlah penduduk dengan salah satu cara, yaitu melakukan pengendalian mortalitas (kematian) dan fertilitas (kelahiran), dimana pemerintah melakukan komunikasi dengan masyarakat secara intensif dan memberikan informasi yang tepat tentang teknologi-teknologi kontrasepsi, sehingga masyarakat akan menyadari bahwa akibat dari pengendalian mortalitas, anak-anak mereka dapat

bertahan hidup hingga dewasa, walaupun anak mereka sedikit tapi kualitas hidup mereka akan lebih baik.

### **3. Implikasi Kebijakan Investasi Swasta**

Investasi swasta memberikan kontribusi yang negatif terhadap pengangguran. Dilihat dari faktor investasi, dunia usaha masih mempunyai ketergantungan besar terhadap investasi pemerintah. Untuk meningkatkan peran investasi swasta yang tidak signifikan, pemerintah harus menyusun strategi agar sektor swasta memberikan pengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. PMDN akan sangat ditentukan oleh tingkat tabungan di masyarakat. Pemerintah sebaiknya meninjau ulang kembali peraturan mengenai penanaman modal asing, sehingga PMA yang ditanamkan investor asing dapat memberikan keuntungan bagi penyerapan tenaga kerja, sehingga diharapkan dengan begitu peluang untuk mengurangi angka pengangguran akan semakin besar.

### **4. Implikasi Kebijakan Upah Minimum Regional**

Upah minimum regional (UMR) memberikan kontribusi yang positif terhadap pengangguran. Tingkat upah minimum yang mulai dikenal di Indonesia pada tahun 1970-an ditetapkan oleh pemerintah. Ketentuan upah minimum mengharuskan perusahaan untuk membayar upah sekurangnya sesuai dengan ketentuan upah minimum pada pekerja yang rendah tingkatnya. Tujuannya untuk mencegah merosotnya upah bila terjadi ketidakseimbangan pasar kerja dan secara bertahap dan periodik meningkatkan tingkat upah sehingga upah minimum sekurangnya sama dengan kebutuhan fisik minimum dan nantinya lebih tinggi dari kebutuhan minimum pekerja.



Undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia dianggap terlalu rigid bagi sebagian kalangan pengusaha. Undang-undang ataupun peraturan ketenagakerjaan memang hanya mampu menjangkau sektor formal saja. Pemerintah daerah sebagai pihak yang menentukan Upah Minimum Provinsi diharapkan untuk lebih memikirkan dampak dari penentuan kebijakan Upah Minimum Provinsi yang berdampak kepada kesejahteraan tenaga kerja di Sumatera Barat.



## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil empiris dari analisa yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa variabel bebas secara bersama-sama dapat mempengaruhi variabel terikat yang mana disini adalah pengangguran di Provinsi Sumatera Barat.

Hasil pengujian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Variabel Pertumbuhan Ekonomi ( $Y_d$ ) mempunyai pengaruh yang positif terhadap pengangguran di Sumatera Barat. Jika pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 1% maka akan menambah pengangguran sebesar 0.466 persen. Sebaliknya jika terjadi penurunan ekonomi maka akan mengurangi pengangguran sebesar 0.466 persen.
2. Variabel Pertumbuhan Penduduk ( $J_p$ ) memiliki pengaruh negatif terhadap pengangguran di Sumatera Barat. Ini mungkin saja terjadi karena proporsi angkatan kerja di sumbar lebih besar dari ketersediaan lapangan kerja yang ada, atau bisa jadi kualitas dari angkatan kerja sumbar tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Hal ini berarti pertumbuhan penduduk daerah Sumbar merupakan beban bagi pembangunan ekonomi.
3. Variabel Investasi Swasta ( $I_s$ ) memiliki pengaruh yang negatif terhadap pengangguran di Sumatera Barat. Hal ini mungkin saja disebabkan oleh proporsi investasi swasta yang tidak begitu besar di Sumatera Barat yang mana secara keseluruhan mengalami penurunan tingkat investasi,

yang salah satu penyebabnya adalah terjadinya krisis moneter yang menjadi krisis ekonomi di Indonesia secara umum dan Sumatera Barat secara khusus.

4. Variabel Upah Minimum Regional ( $w$ ) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengangguran di Sumatera Barat. Setiap kenaikan UMR sebesar 1% maka akan mengurangi pengangguran sebesar 1.390 persen. Sebaliknya jika terjadinya penurunan UMR maka akan meningkatkan pengangguran sebesar 1.390 persen dengan asumsi *ceteris paribus*.

## 6.2 Saran

Untuk memacu perkembangan perekonomian daerah, pemerintah daerah harus bertindak sebagai fasilitator dalam menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang perekonomian, efisiensi pelayanan publik dapat tercapai bila pungutan yang dilakukan sebanding dengan manfaat yang diterima masyarakat. Dengan efisiensi pelayanan publik akan tercapai peningkatan perekonomian, karena pelayanan publik pemerintah bersifat saling melengkapi dengan investasi atau aktifitas ekonomi lainnya di daerah. Untuk itu perlu perencanaan ekonomi yang matang berkaitan dengan aturan dana perimbangan dengan memperhatikan akses-akses negatif akibat perilaku pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

1. Dari segi Pertumbuhan Ekonomi, penanaman modal disektor industri hendaknya bersifat padat karya. Dengan pengoptimalan sumber-sumber daya manusia yang tersedia dengan tingkat pendidikan yang bervariasi

dan dapat dilatih sesuai dengan keinginan pasar kerja, maka selain akan meningkatkan pendapatan daerah juga akan berdampak pada pengurangan jumlah pengangguran.

2. Dari segi Pertumbuhan Penduduk, perlunya kebijaksanaan yang ditekankan pada pencapaian mutu keterampilan dan produktifitas tenaga kerja melalui pemberian pelatihan-pelatihan kursus keterampilan dan keahlian secara intensif ataupun dengan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan kejuruan. Penduduk yang bermutu dan memiliki keterampilan serta terlatih ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja sendiri. Selain itu, penambahan jumlah penduduk harus mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah daerah. Akibat yang timbul dari peningkatan jumlah penduduk adalah penambahan jumlah tenaga kerja baru. Jika tenaga kerja baru ini tidak dapat terserap di pasar tenaga kerja, maka akan menambah jumlah pengangguran yang telah ada. Untuk itu program keluarga berencana perlu dilaksanakan lebih gencar lagi dan mengubah pola pikir masyarakat bahwa “banyak anak banyak rezeki” adalah tidak benar.
3. Dari segi tingkat investasi swasta, sebaiknya dilakukan evaluasi ulang mengenai prosedur administrasi penanaman modal. Prosedur yang diharapkan tidak berbelit-belit dan birokratis, sehingga para investor lebih mudah dalam administrasi penanaman modalnya. Keamanan berinvestasi baik ditinjau dari pihak masyarakat maupun pemerintah di daerah juga menjadi penentu mau atau tidaknya investor melakukan investasi. Menjaga



isu-isu tentang daerah baik isu social, ekonomi maupun politik yang akan mempengaruhi perkembangan investasi di daerah tersebut.

4. Dari segi upah minimum regional yang ditetapkan pemerintah, diharapkan dapat diterapkan secara nyata. Hal ini tentu saja perlu ada pengawasan dalam pelaksanaannya baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat (perusahaan/pemberi upah). Diharapkan dari kebijakan upah yang dikeluarkan ini tidak menurunkan tingkat kesejahteraan tenaga kerja tanpa harus mengurangi penyerapan tenaga kerja sebagai konsekuensi dari penetapan upah yang tinggi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln, 1997: *Ekonomi Pembangunan*, Edisi Ketiga, Penerbit BP STIE YKPN, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2010, *Informasi Ketenagakerjaan*, Padang: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik, (2000-2010): *Sumatera Barat Dalam Angka*, Padang: Badan Pusat Statistik.
- Baltagi, Badi H. dkk, 2011: *The Turkish Wage Curve: Evidence from the Household Labor Force Survey*, Working Paper No: 11/06, Central Bank of The Republic of Turkey.
- Blomstrom, Magnus & Ari Kokko, 2000: *Outward Investment, Employment and Wages In Swedish Multinationals*, The European Institute of Japanese Studies.
- Boediono, 1999: *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, Penerbit BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta.
- Boediono, 2001: *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi, Ekonomi Makro, Edisi Keempat*, Penerbit BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta.
- Dumairy, 1996: *Perekonomian Indonesia*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Elfindri, 2001: *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Penerbit Andalas University Press, Padang.
- Elfindri, dan Nasri Bachtiar. 2004: *Ekonomi Ketenagakerjaan*, Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Padang.
- Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
- Gujarati, Danodar, 2002: *Ekonometrika Dasar*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Hakro, Ahmed Nawaz, 2009: *Size of Government and Growth Rate of Per Capita Income in Selected Asian Developing Economics*, International Research Journal of Finance and Economics.
- Hoppe, Hans-Hermann, 2003: *Teori Umum Keynes Dalam Pandangan Misesian*. Institut Ludwig von Mises.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln, 1997: *Ekonomi Pembangunan*, Edisi Ketiga, Penerbit BP STIE YKPN, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2010, *Informasi Ketenagakerjaan*, Padang: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik, (2000-2010): *Sumatera Barat Dalam Angka*, Padang: Badan Pusat Statistik.
- Baltagi, Badi H. dkk, 2011: *The Turkish Wage Curve: Evidence from the Household Labor Force Survey*, Working Paper No: 11/06, Central Bank of The Republic of Turkey.
- Blomstrom, Magnus & Ari Kokko, 2000: *Outward Investment, Employment and Wages In Swedish Multinationals*, The European Institute of Japanese Studies.
- Boediono, 1999: *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, Penerbit BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta.
- Boediono, 2001: *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi, Ekonomi Makro, Edisi Keempat*, Penerbit BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta.
- Dumairy, 1996: *Perekonomian Indonesia*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Elfindri, 2001: *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Penerbit Andalas University Press, Padang.
- Elfindri, dan Nasri Bachtiar.2004: *Ekonomi Ketenagakerjaan*, Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Padang.
- Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
- Gujarati, Danodar, 2002: *Ekonometrika Dasar*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Hakro, Ahmed Nawaz, 2009: *Size of Government and Growth Rate of Per Capita Income in Selected Asian Developing Economics*, International Research Journal of Finance and Economics.
- Hoppe,Hans-Hermann, 2003: *Teori Umum Keynes Dalam Pandangan Misesian*. Institut Ludwig von Mises.

- Hussain, dkk, 2010: *A Coherent Relationship between Economic Growth and Unemployment: An Empirical Evidence from Pakistan*, International Journal of Human and Social Sciences.
- Lembaga Demografi UI, 1981: *Dasar-dasar Demografi*. Lembaga Penerbit FEUI: Jakarta.
- Lipsey, Richard G. dkk, 1991: *Pengantar Makroekonomi, Edisi Kedelapan*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad, 1997: *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan*, Edisi Ketiga, Penerbit UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Melayu, Hasibuan, 2003: *Manajemen SDM*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Malik, dkk, 2011: *Demographic Transition and Economic Growth in Pakistan*, European Journal of Scientific Research.
- Mankiw, N. Gregory, 2003: *Teori Makro Ekonomi, Edisi Kelima*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Nawi, Marnis, 1990: *Metodologi Penelitian*. Penerbit FPIPS IKIP, Padang.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, No.8, Tahun 1981, Tentang *Perlindungan Upah*.
- Ritonga, 2003: *Ekonomi SMA*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Samuelson, Paul A. & William D. Nordhaus, 1992: *Makro Ekonomi, Edisi Keempatbelas*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Simanjuntak, Payaman.J. 1998: *Pengantar Ilmu Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Penerbit LPFE-UI, Jakarta.
- Sodipe, Oluyomi Ayoyinka & Oluranti Isaiah Ogunrinola, 2011: *Employment and Economic Growth Nexus in Nigeria*, International Journal of Business and Social Science, Vol. 2 No. 11.
- Sofyardi. 1999: *Dampak Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pembangunan Ekonomi*. Penerbit Pusat Studi Ekonomi Koperasi Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta, Padang.
- Sukirno, Sadono. 2000: *Makro Ekonomi Modern*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.



- Sukirno, Sadono. 2004: *Pengantar Teori Makro Ekonomi, Edisi Ketiga*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Supratikno, Hendrawan, dkk, 1994: *Pengembangan Industri Kecil di Indonesia*.
- Tambunan, Tulus H. 2001: *Perekonomian Indonesia*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Tjiptoherijanto, Prijono, 1990: *Upah Minimal dan Serikat Pekerja*, Penerbit Lembaga Demografi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Tjiptoherijanto, Prijono, 1996: *Sumber Daya Manusia Dalam Pembangunan Nasional*, Penerbit LP-FEUI, Jakarta.
- Todaro, Michael P. 2000: *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- World Bank, 2003: *Kota-kota dalam Transisi : Tinjauan Sektor Perkotaan pada Era Desentralisasi di Indonesia*, Urban Development Working Papers no.7.
- [www.bpssumbar.go.id](http://www.bpssumbar.go.id), *Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat, 2010*.
- [www.depnakertrans.go.id](http://www.depnakertrans.go.id)
- [www.sumbarprov.go.id](http://www.sumbarprov.go.id) , *Profil Provinsi Sumatera Barat (Oktober, 2008)*.
- [www.sumbarprov.go.id](http://www.sumbarprov.go.id), *BKPMd Sumatera Barat: Realisasi PMDN dan PMA Sumatera Barat, 2010*.

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.957 <sup>a</sup>	.915	.858	.13771	.915	16.148	4	6	.002	1.351

a. Predictors: (Constant), UMR, Investasi Swasta, Pertumbuhan Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi

b. Dependent Variable: Pengangguran

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.225	4	.306	16.148	.002 <sup>a</sup>
	Residual	.114	6	.019		
	Total	1.339	10			

a. Predictors: (Constant), UMR, Investasi Swasta, Pertumbuhan Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi

b. Dependent Variable: Pengangguran

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations		
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part
1	(Constant)	10.577	2.249		4.704	.003			
	Pertumbuhan Ekonomi	.466	.065	1.272	7.136	.000	.765	.946	.849
	Pertumbuhan Penduduk	.031	.020	.224	1.531	.177	.306	.530	.182
	Investasi Swasta	.002	.163	.002	.014	.990	-.270	.006	.002
	UMR	-1.390	.289	-.858	-4.806	.003	.147	-.891	-.572

a. Dependent Variable: Pengangguran

## LAMPIRAN

### Jumlah dan Laju Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan 2000 Provinsi Sumatera Barat 2000-2010

Tahun	PDRB (Juta Rupiah)	Laju Pertumbuhan (%)	Pendapatan Perkapita (Konstan 2000)
2000	22.889.614,050	3,84	5.416.274,15
2001	23.727.373,920	3,66	5.591.449,99
2002	24.840.187,750	4,69	5.790.730,04
2003	26.146.781,640	5,26	5.866.695,33
2004	27.578.136,550	5,47	6.070.879,68
2005	29.159.480,530	5,73	6.393.820,89
2006	30.949.945,110	6,14	6.681.547,82
2007	32.912.968,600	6,34	7.006.092,39
2008	35.007.921,570	6,37	7.349.820,28
2009	36.464.583,000	4,16	7.552.772,77
2010	36.683.274,000	5,93	7.569.807,91

### Perkembangan Angkatan Kerja, Kesempatan Kerja dan Pengangguran Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2000-2010 ( Jiwa )

Tahun	Angkatan Kerja	Kesempatan Kerja	Pengangguran
2000	1.707.720	1.648.925	58.795
2001	1.769.276	1.703.564	65.712
2002	1.818.458	1.708.403	110.055
2003	198.908	1.725.374	255.534
2004	1.916.883	1.672.605	244.278
2005	1.932.452	1.710.249	222.203
2006	2.055.734	1.811.517	244.217
2007	2.126.559	1.907.098	219.461
2008	2.122.217	1.951.391	170.826
2009	2.172.002	1.998.922	173.080
2010	2.194.040	2.041.454	152.586

**Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk  
Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2000-2010**

<b>Tahun</b>	<b>Laki-laki (orang)</b>	<b>Perempuan (orang)</b>	<b>Total (orang)</b>	<b>Laju Pertumbuhan (%)</b>
2000	2.070.600	2.149.720	4.220.320	-7,08
2001	2.082.020	2.161.500	4.375.080	0,55
2002	2.147.170	2.227.910	4.243.510	3,10
2003	2.187.200	2.269.700	4.456.800	1,87
2004	2.225.874	2.302.395	4.528.242	1,60
2005	2.256.969	2.346.988	4.603.957	1,67
2006	2.285.482	2.346.670	4.632.152	0,61
2007	2.311.652	2.386.112	4.697.764	1,42
2008	2.346.299	2.416.800	4.763.099	1,39
2009	2.367.599	2.460.374	4.827.973	1,36
2010	2.404.472	2.441.526	4.845.998	0,37

**Perkembangan Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat.  
Tahun 2000-2010**

<b>Tahun</b>	<b>Nilai UMR (Rupiah per bulan)</b>
2000	200.000
2001	250.000
2002	385.000
2003	435.000
2004	480.000
2005	540.000
2006	650.000
2007	725.000
2008	800.000
2009	880.000
2010	1.055.000



**Nilai Investasi Pemerintah Atas Dasar Harga Konstan 2000  
dan Realisasi PMDN / PMA**

**Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2000-2010**

<b>Tahun</b>	<b>Investasi pemerintah (Rp. Milyar)</b>	<b>PMDN (Rp. 000)</b>	<b>PMA (Rp. 000)</b>	<b>Investasi Swasta =PMDN+PMA (Rp. 000)</b>
2000	4.686,00	187.773.150	514.892.424	702.665.574
2001	4.736,14	183.976.140	1.104.420.486	1.288.396.626
2002	4.785,54	348.234.000	1.097.790.038	1.446.024.038
2003	4.934,28	204.464.890	251.442.857	455.9077.47
2004	5.091,19	631.733.330	265.350.770	897.084.100
2005	5.388,13	607.061.000	830.447.145	1.437.508.145
2006	5.604,65	234.856.820	804.298.040	1.039.154.860
2007	5.824,27	58.511.100	64.137.435	122.648.535
2008	6.112,93	608.917.890	199.374.009	808.291.899
2009	6.344,16	761.617.900	216.238.818	977.856.718
2010	6.567,29	404.650.270	158.847.003	563.497.273

*Sumber : BPS, BKPMd dan Bank Indonesia*

**Realisasi PMDN dan PMA Sumbar dan kurs US\$ tahun 2000-2010**

<b>Tahun</b>	<b>PMDN (Rp. 000)</b>	<b>PMA (US \$ 000)</b>	<b>Kurs US \$</b>	<b>PMA (Rp. 000)</b>
2000	187.773.150	4.417,74	8.396	514.892.424
2001	183.976.140	41.097,09	10.265	1.104.420.486
2002	348.234.000	4.354,60	9.760	1.097.790.038
2003	204.464.890	18.551,84	8.570	251.442.857
2004	631.733.330	18.443,95	8.985	265.350.770
2005	607.061.000	90.265,99	9.705	830.447.145
2006	234.856.820	87.423,70	9.200	804.298.040
2007	58.511.100	7.028,76	9.125	64.137.435
2008	608.917.890	20.626,32	9.666	199.374.009
2009	761.617.900	20.994,06	10.300	216.238.818
2010	404.650.270	17.807,96	8.920	158.847.003